



LAPORAN KINERJA 2024 SEKRETARIAT

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



LAPORAN KINERJA 2024 SEKRETARIAT

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2024 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Bahasa tahun 2024. Sekretariat Badan Bahasa pada tahun 2024 menetapkan 1 (satu) sasaran dan 2 (dua) indikator kinerja. Secara umum Sekretariat Badan Bahasa telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.


Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Sekretariat Badan Bahasa sejak tahun 2020 sampai dengan 2023, dan secara spesifik menjelaskan kinerja tahun 2024. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya, di tahun 2025—2029.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang Pendidikan baik dasar dan menengah serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Sekretariat Badan Bahasa pada tahun 2024.

Jakarta, 30 Januari 2025
Sekretaris Badan Bahasa,




Ganjar Harimansyah
NIP 197505222001121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	V
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
 BAB I PENDAHULUAN	 5
A. Gambaran Umum	5
B. Dasar Hukum	7
C. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi	7
D. Isu Strategis	9
E. Peran Strategis	9
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 11
A. Rencana Strategis	11
Tujuan Strategis	11
Matriks Kinerja	12
B. Rencana Kerja dan Anggaran	12
C. Perjanjian Kinerja	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 19
A. Akuntabilitas Kinerja	19
B. Realisasi Agenda Prioritas	60
C. Realisasi Anggaran	62
1. Capaian Anggaran	62
2. Efisiensi Anggaran	63
D. Kinerja Lain-Lain	63
b. Informasi Capaian Kinerja Lainnya	65
c. Inovasi	69
d. Penghargaan	71
e. Program Crosscutting/Kolaborasi	74
 BAB IV PENUTUP	 79

DAFTAR FOTO

Penghargaan Penyelenggaraan SAKIP Sekretariat Badan Bahasa TA 2022 pada Maret 2023	30
Layanan Informasi Publik	34
Narasumber dari UI untuk fitur PPID	34
Fitur Publikasi Data Dukung SAKIP pada Laman Badan Bahasa	34
Pemilihan Pegawai Berprestasi Tahun 2024	36
Narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan materi Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan	36
Press Tour Kongres Pameran Kebahasaan dan Kesastraan 2024	39
Evaluasi Organisasi Badan Bahasa	45
Pendampingan PEKPP di Kantor Bahasa NTB	46
Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Bogor	48
Pendampingan Pengelolaan Keuangan di UPT	50
Penyusunan laporan keuangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 dan 2024	51
Penyusunan laporan keuangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa TA 2023 Unaudited	51
Penyusunan bahan SPIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	52
Aktivitas Bedah Buku di Lingkungan Badan Bahasa	56
Seminar dan Pameran Perpustakaan Badan Bahasa	56
Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Satker	59
Kegiatan Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia di Negara Brunei Darussalam	60
Kegiatan Majelis Sastra Asia Tenggara di Jakarta	61
Fitur informasi jadwal pengujian di GESIT Widyabasa	69
Fitur informasi soal pengujian Widyabasa	70
Narasumber dari CISCO Academy Pengembangan laman Dapobas	70
Kegiatan “Parade Puisi Untuk Gaza”	71
Penghargaan Pegawai Berprestasi bidang Manajerial tahun 2024	74
Penyerahan Buku Bacaan Pendukung Literasi ke Walikota Solo	74
100 Tahun AA Navis: Rayakan Warisan Sastra dan Pemikiran Bangsa, di Perpustakaan Nasional	75
Diskusi IPBas dengan mitra BRIN	78
Pengembangan Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan dengan BPS	78

DAFTAR TABEL

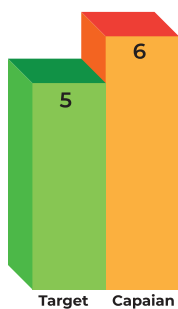
Tabel 1 Target dan Capaian IKK Sekretariat Badan Bahasa Tahun 2020—2021	22
Tabel 2 Target dan Capaian IKK Sekretariat Badan Bahasa Tahun 2022—2024	24
Tabel 3 Target dan Capaian IKK Sekretariat Badan Bahasa Tahun 2022—2024	27
Tabel 4 Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Satker Tahun 2022—2024	28
Tabel 5 Capaian ZI-WBK/WBBM Tahun 2020—2021	40
Tabel 6 Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM Tahun 2022—2024	42
Tabel 7 Satker yang diusulkan mendapatkan ZI-WBK-WBBM tahun 2022—2024	43
Tabel 8 NKA satker di lingkungan Badan Bahasa Tahun 2020—2021	58
Tabel 9 Nilai Entitas Badan Bahasa hasil Pengawasan Kearsipan Internal tahun 2023	73

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Tahun 2024 menyajikan tingkat pencapaian satu sasaran kegiatan indikator kinerja kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Laporan kinerja tahun 2024 ini merupakan masa akhir Renstra, sehingga perlu diinformasikan kembali terkait capaian Renstra 2020—2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Berikut ringkasan capaian kinerja Sekretariat Badan Bahasa tahun 2020—2024.

Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK

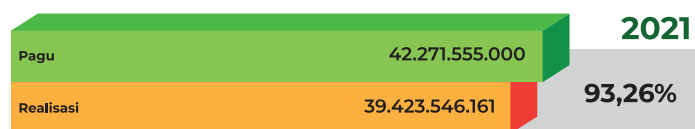
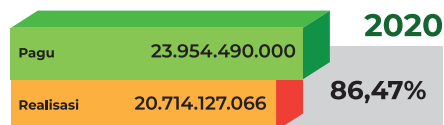


2020

Jumlah Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM



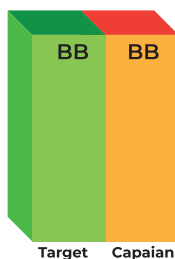
2021



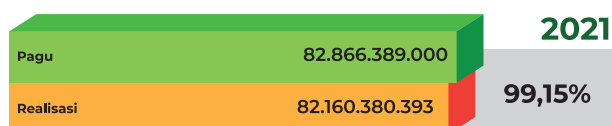
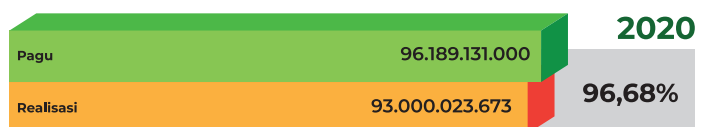
Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB



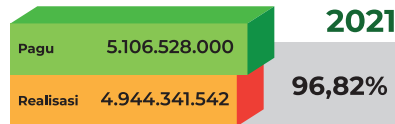
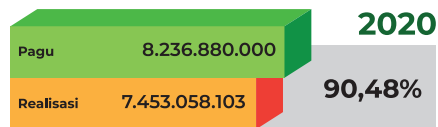
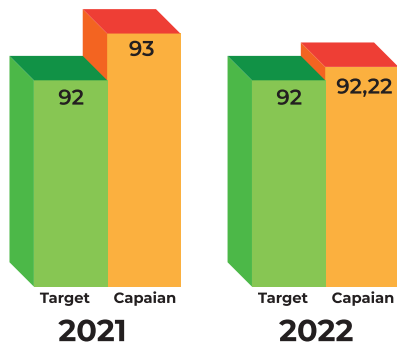
2020



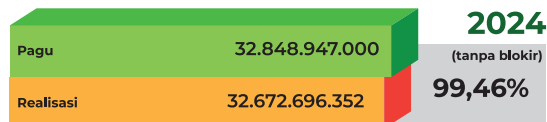
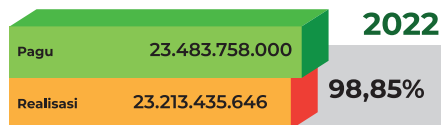
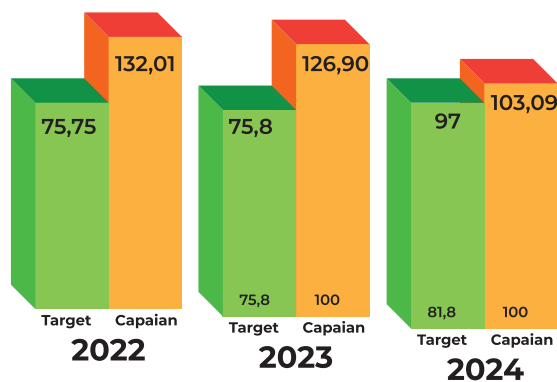
2021



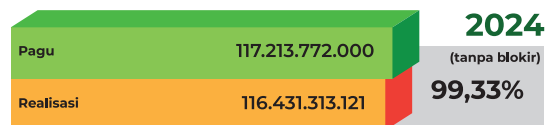
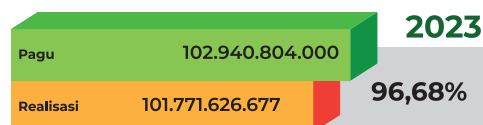
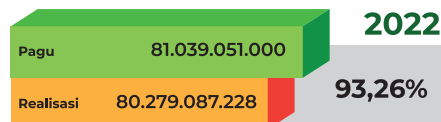
Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran
atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker
Minimal 91



Persentase satker di Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa yang memiliki
predikat SAKIP minimal BB



Jumlah Satker di Badan
Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa yang diusulkan mendapatkan
predikat ZI-WBK/WBBM





BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum



Sekretariat Badan Bahasa merupakan salah satu satker eselon II di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat Badan Bahasa terbentuk pada tahun 2010 setelah disahkannya Peraturan Presiden nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Berdasarkan peraturan ini, Pusat Bahasa berganti nama menjadi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, unit utama (eselon I) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

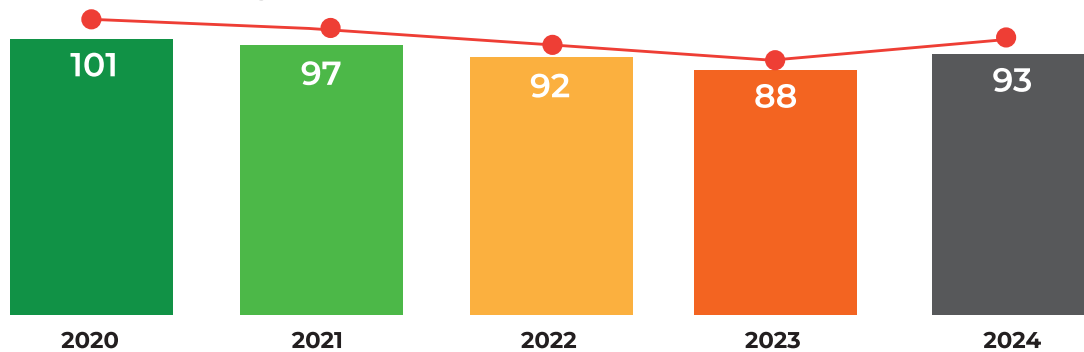


Wilayah kerja Sekretariat Badan Bahasa melingkupi seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tugas Sekretariat Badan Bahasa adalah melaksanakan pelayanan administrasi dan koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.

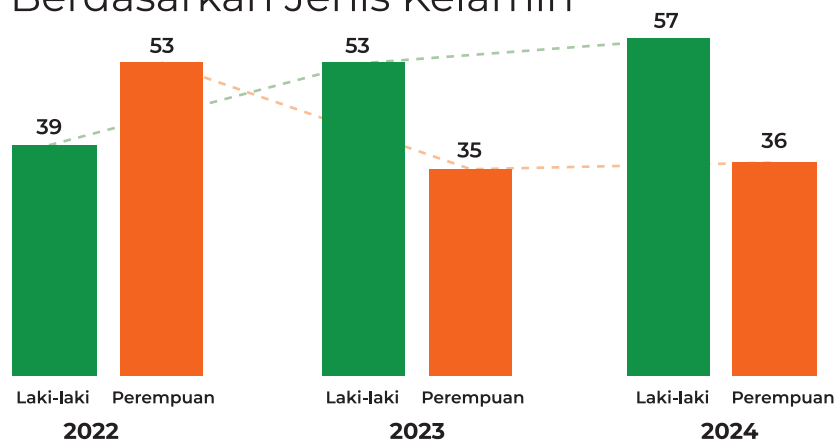
Sekretariat Badan Bahasa di tahun 2024 dipimpin oleh Hafidz Muksin dengan jumlah SDM sebanyak 89 orang ASN dan 4 orang PPPK, total 93 pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Bahasa. Di Tahun 2025 terdapat pergantian pimpinan eselon II di lingkungan Badan Bahasa pada tanggal 20 Januari 2025, sehingga Sekretaris Badan Bahasa tahun 2025 yaitu Ganjar Harimansyah.

Berikut klasifikasi pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Bahasa berdasarkan jenis kelamin, golongan, jenjang pendidikan, dan jabatan.

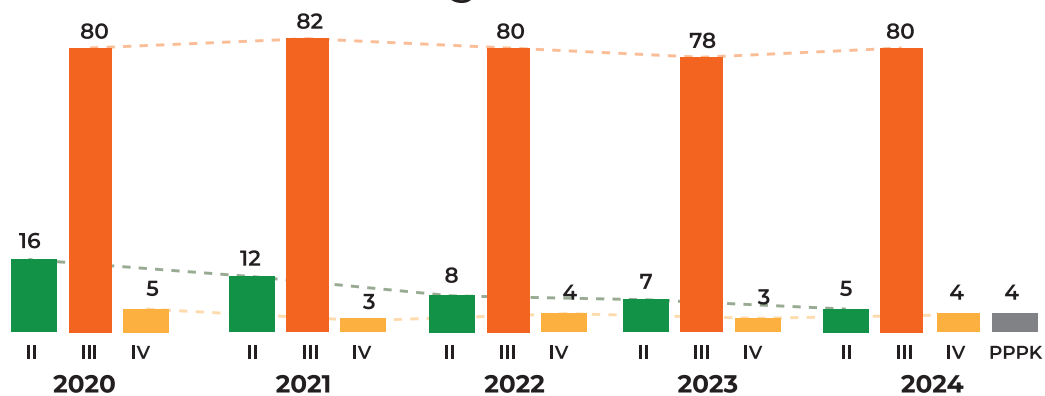
Jumlah Pegawai



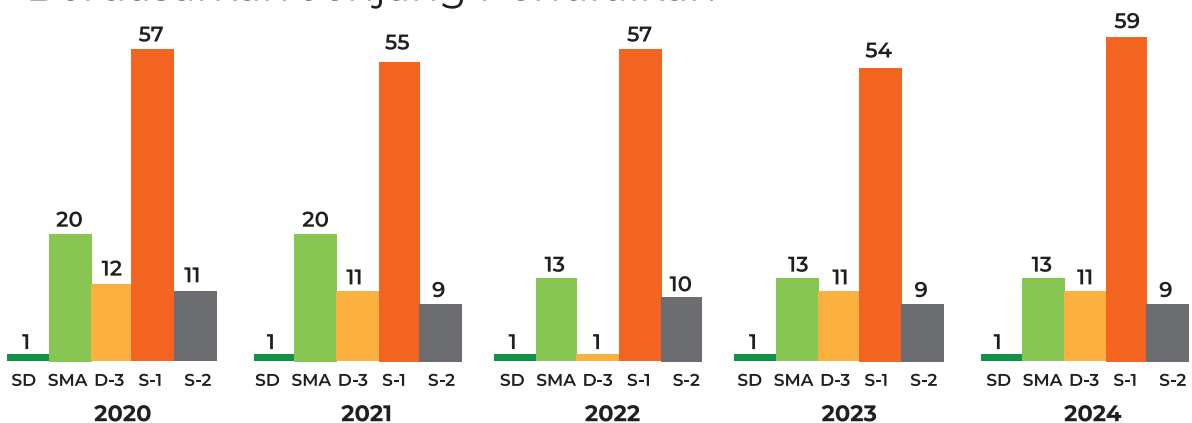
Berdasarkan Jenis Kelamin



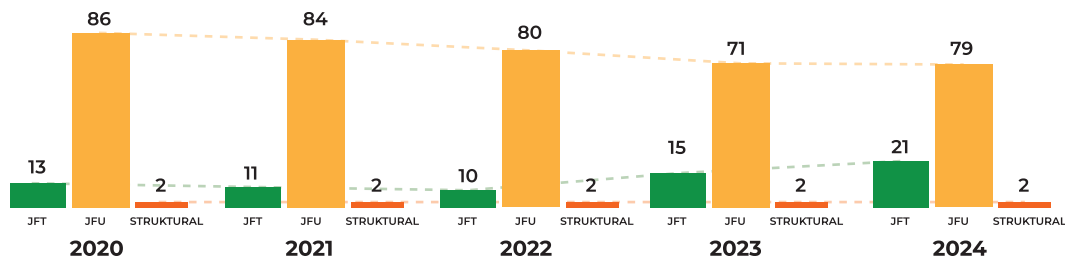
Berdasarkan Golongan



Berdasarkan Jenjang Pendidikan



Berdasarkan Jabatan



B. Dasar Hukum

1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 ▼ tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah	2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 ▼ tentang Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia	3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 ▼ tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	4 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 ▼ tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156)
5 Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 ▼ tentang ementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 ▼ tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	7 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 ▼ tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi	8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 ▼ tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 ▼ tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 2020-2024	10 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 ▼ tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 ▼ tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 Tahun 2023 ▼ tentang Standar Biaya Keluaran Umum
13 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 ▼ tentang OTK Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	14 Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 239/O/2024 ▼ tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	15 Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 ▼ tentang Rencana Srategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020-2024	

C. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga sebagai dampak pelantikan Kabinet Merah Putih atas Presiden terpilih diatur Peraturan Presiden Nomor 140 tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian dan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024—2029. Masa transisi yang terjadi di penghujung tahun pelaksanaan anggaran mengubah nomenklatur Kementerian yang semula Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa masuk kedalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

Namun dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran tahun 2024, satker yang semula berada di Kemendikbudristek tetap menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang OTK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, berikut tugas dan fungsi Sekretariat Badan Bahasa.

PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
NOMOR 28 TAHUN 2021

TUGAS

Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan Badan.

FUNGSI

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang bahasa dan sastra. | 7 | Pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan. |
| 2 | Pengelolaan data dan informasi di bidang bahasa dan sastra. | 8 | Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang bahasa dan sastra Indonesia. |
| 3 | Koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang bahasa dan sastra. | 9 | Pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan. |
| 4 | Koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan Badan. | 10 | Koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang bahasa dan sastra. |
| 5 | Penyusunan bahan peraturan perundang-undangan dan penelaahan dan fasilitasi advokasi hukum di lingkungan Badan. | 11 | Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan. |
| 6 | Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksanaan di lingkungan Badan. | | |

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT BPPB



Hafidz Muksin
Sekretaris Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa

Subbagian Tata usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional

2022—2024



Ganjar Harimansyah
Sekretaris Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa

Subbagian Tata usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional

2025

HEBAT

Harmonis

Selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas

Energik

Bersemangat dalam meraih kinerja yang lebih baik

Bermutu

Berkualitas dan berbobot

Akuntabel

Dapat diandalkan dan bertanggungjawab

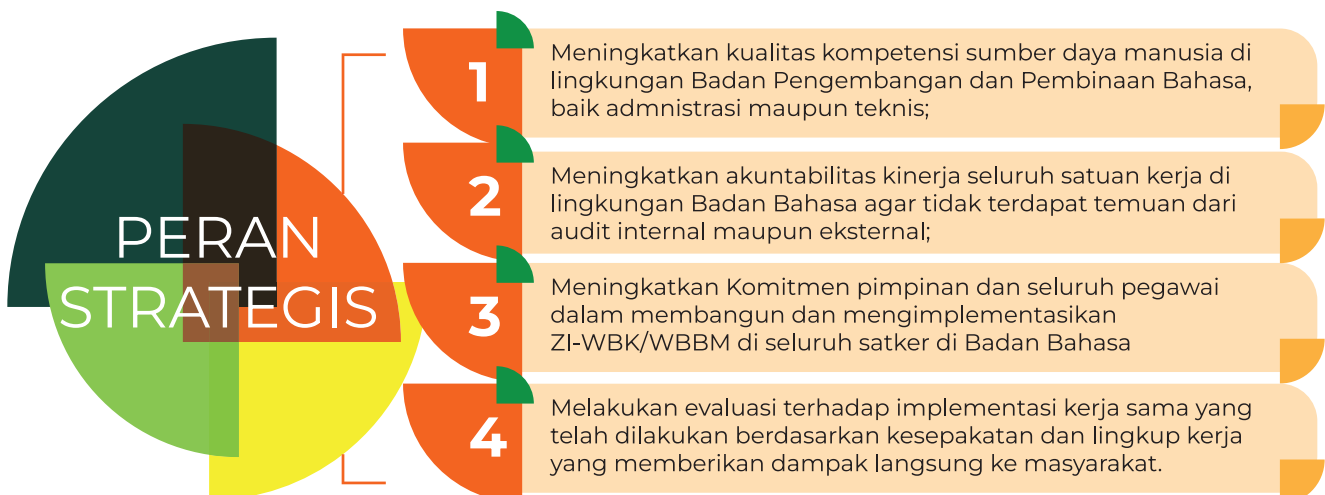
Transparan

Keterbukaan terhadap informasi publik

D. Isu Strategis



E. Peran Strategis



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Dalam Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Pengembangan Bahasa dan Sastra, Sekretariat Badan Bahasa memiliki visi dan misi yang mengacu visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang merupakan turunan dari visi dan misi Presiden sebagai berikut.

VISI

Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra.

MISI

1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan.
2. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.
3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah.
4. Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Tujuan Strategis

Dalam rangka melakukan **Peningkatan Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel**, Sekretariat Badan Bahasa memiliki tujuan strategis dan indikator tujuan strategis Renstra tahun 2020—2021 sebagai berikut.

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Target 2024
Terwujudnya tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang berkualitas	[01] Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa minimal BB (Predikat)	BB
	[02] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mendapatkan predikat ZIWBK/WBBM (Satker)	8

Berikut Tujuan Strategis Rencana Strategis Tahun 2022—2024.

Tujuan Strategis	Indikator Tujuan Strategis	Satuan	Target tahun 2024
Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A
Meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi Kemendikbudristek	Jumlah satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	4

Matriks Kinerja

Sekretariat Badan Bahasa menetapkan sasaran, indikator dan target tahun 2020—2021 dan 2022—2024 sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar	Satuan	Target		Target 2024
			2020	2021	
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa					
Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	CC	Predikat	BB	BB	BB
Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK	4	Satker	5	2	2
Jumlah Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	1	Satker	2	2	2
Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	91	Nilai	92	93	95

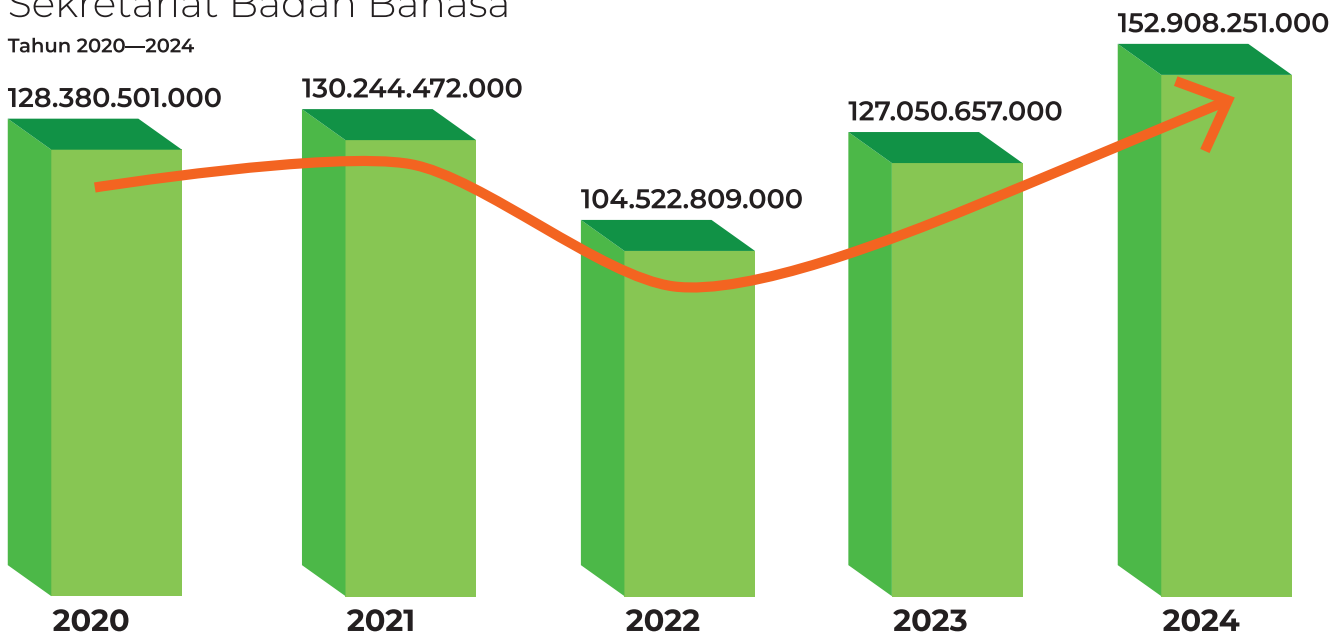
Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar 2020	Satuan	Target		
			2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa					
Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	69,70	%	75,75	78,8	81,8
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	5	Satker	5	5	5

B. Rencana Kerja dan Anggaran

Sebagai pengguna anggaran Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra, menyusun rencana kerja dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Berikut tren alokasi anggaran 2020-2024 Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra, berikut perbandingan anggaran dari tahun 2020 sampai tahun 2024.

Tren Alokasi Anggaran Sekretariat Badan Bahasa

Tahun 2020—2024



Alokasi anggaran di tahun **2020** dan 2021 dipengaruhi beberapa kebijakan nasional yang wajib dilaksanakan oleh satker di lingkungan Kemendikbudristek terutama dalam masa penanganan pandemi Covid-19, dan masa transisi penyesuaian alokasi anggaran setiap satker di lingkungan Badan Bahasa dalam rangka pemenuhan baik belanja pegawai maupun barang untuk mengakomodasi sistematis pencapaian program dan kegiatan melalui Kelompok Kepakaran Layanan Profesional (KKLP). Selama tahun 2020 terjadi perubahan anggaran karena adanya kebijakan dan kondisi khusus yang terjadi saat pandemi covid-19. Selain itu berikut penyebab penyesuaian anggaran di tahun 2020.

1. Pemotongan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19,
2. Pemotongan anggaran untuk pemenuhan pulsa bagi peserta didik, dan
3. Pemotongan anggaran untuk bantuan subsidi upah (BSU) dan pengalihan belanja pegawai ke UPT di lingkungan Badan Bahasa.

Penyesuaian alokasi anggaran di tahun 2020 semula Rp150.868.636.000,00 menjadi Rp128.380.501.000,00.

Di tahun **2021** terjadi kenaikan anggaran dibandingkan dengan alokasi anggaran di tahun 2021. Hal ini dikarenakan untuk mengakomodasi pencetakan dan pengiriman buku Literasi ke daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) ke 84 kabupaten/kota di 18 provinsi, di 14.107 PAUD, 14.632 SD, 4.792 SMP, 1.695 SMA, 944 SMK, 319 TBM, dan 40 Perpustakaan Daerah serta melakukan pemantauan pengiriman dan upaya memperoleh informasi kebermanfaatan program Gerakan Literasi Nasional (GLN). Sepanjang tahun 2021, terdapat beberapa penyesuaian alokasi anggaran Sekretariat Badan Bahasa lainnya sampai dengan akhir tahun, yaitu:

1. Perubahan pimpinan satker,
2. Penyesuaian anggaran karena penghematan anggaran berasal dari belanja pegawai tunjangan kinerja,

3. Penyesuaian anggaran karena realokasi belanja modal untuk belanja modal UPT,
4. Penyesuaian anggaran karena *refocusing* dan realokasi belanja untuk penanganan Covid-19,
5. Penyesuaian anggaran karena realokasi belanja untuk pemenuhan belanja pegawai UPT, dan
6. Penyesuaian anggaran karena *refocusing* untuk TPG dan TKG non PNS dan beasiswa unggulan.

Sehingga penyesuaian alokasi anggaran di tahun 2021 semula Rp169.447.384.999,00 menjadi Rp130.244.472.000,00.

Penurunan alokasi anggaran di tahun **2022** sebesar Rp25.271.663.000,- dari alokasi tahun 2021 karena adanya migrasi sejumlah pegawai Badan Bahasa ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sehingga hal ini mempengaruhi jumlah total anggaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Badan Bahasa tahun 2022 yang dianggarkan oleh Sekretariat Badan Bahasa. Berikut beberapa penyebab lain terjadinya penyesuaian anggaran di lingkungan Sekretariat Badan Bahasa.

1. Pengalihan belanja media dari Sekretariat Badan Bahasa ke Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat (BKHM),
2. Belanja pegawai yang berstatus *automatic adjustment* (AA) dari Sekretariat Badan Bahasa dikembalikan ke BA BUN, dan pengalihan belanja pegawai sebagai akibat dari mutasi pegawai Badan Bahasa ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dan
3. Realokasi belanja modal dari Sekretariat ke kantor Bahasa Gorontalo dan Maluku, dan realokasi belanja pegawai dari 32 satker di lingkungan Badan Bahasa ke Sekretariat Badan Bahasa.

Penyesuaian alokasi anggaran di tahun 2022 semula Rp126.464.000,00 menjadi Rp104.522.809,00.

Di tahun **2023** terdapat kebijakan sentralisasi pengadaan sarana dan prasarana satker di lingkungan Badan Bahasa yang diusulkan untuk mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM. Sehingga terdapat kenaikan pagu alokasi sebesar Rp22.527.828.000,- dioptimalkan untuk memenuhi persyaratan minimal sarana dan prasarana satker yang diusulkan ZI-WBK/WBBM di lingkungan Badan Bahasa. Selain hal tersebut, Sekretariat Badan Bahasa melakukan penyesuaian anggaran dikarenakan adanya :

1. pemenuhan kekurangan belanja operasional di dua satker Badan Bahasa, yaitu Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur,
2. pengembalian belanja pegawai yang terkena *automatic adjustment* (AA) ke Bendahara Umum Negara (BUN), dan
3. digunakan untuk pembelian kendaraan dinas jabatan dan operasional di lima satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Penyesuaian alokasi anggaran di tahun 2023 semula Rp126.464.000,00 menjadi Rp104.522.809,00.

Kenaikan alokasi pagu anggaran di tahun **2024** sebesar Rp25.857.594,- masih sama dengan tahun 2024, Sekretariat Badan mengalokasikan anggaran untuk

pembayaran tunjangan kinerja jabatan fungsional tertentu (JFT) Widyabasa. Di tahun 2024 semula diperkirakan peraturan perundangan-undangan terkait pembayaran tunjangan fungsional Widyabasa akan diundangkan dan diberlakukan. Namun terdapat beberapa kendala saat akan dilakukan upaya harmonisasi ke mitra eksternal Kemendikbudristek

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar 2020	Kinerja		Alokasi 2024
		Target	Kondisi Akhir 2024	
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa				
Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	69,7	97	100	32.848.947.000
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	5	10	12	117.213.772.000

Berikut Rencana Kinerja Tahunan merupakan hasil unduhan aplikasi Krisna Renja-K/L Tahun 2024.

REKAP 2A: PROGRAM K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2024

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

2. UNIT ORGANISASI

13 - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

3. SASARAN STRATEGIS K/L YANG DIDUKUNG

03 - Meningkatkan penguatan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan

4. PROGRAM

Program Penguatan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan

5. PRIORITAS NASIONAL

KODE	PRIORITAS NASIONAL / PROGRAM PRIORITAS	ALOKASI 2024 (RIBU)
04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	160.338.276,0
04.04	Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	160.338.276,0
	Total	160.338.276,0

6. SASARAN PROGRAM (OUTCOME) DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

KODE	SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)	TARGET 2024	ALOKASI 2024 (RIBU)
01	Meningkatnya Literasi Kebahasaan dan Kesastran		140.963.149,0
01.01	Persentase penutur bahasa Indonesia terbiasa yang meningkat kualitas berbahasanya	72	
01.02	Persentase lembaga terbiasa yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	91,99	
02	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah		72.775.074,0

7. OUTPUT PROGRAM DAN INDIKATOR OUTPUT PROGRAM

KODE	OUTPUT PROGRAM / INDIKATOR OUTPUT PROGRAM	ALOKASI 2024 (RIBU)
13	Bahasa dan Sastra Terkembangkan, Terbina, dan Terlindungi	280.845.395,0
13.01	Jumlah orang mahir teruji kemahiran berbahasa Indonesia	
13.02	Jumlah bahasa terlindungi	
13.03	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	
	Total	280.845.395,0

8. KEGIATAN DAN PENDANAAN

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PON	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2025	2026	2027
2021	Pengembangan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra	109.034.558,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109.034.558,0	111.912.598,0	114.876.976,0	117.930.276,0
2022	Pembinaan Bahasa dan Sastra	103.739.690,0	969.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	104.709.665,0	99.042.979,0	102.014.535,0	105.075.044,0
	Total	212.774.248,0	969.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	213.744.223,0	210.957.577,0	216.891.411,0	223.005.320,0

KODE	PROGRAM	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2024										PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)			
		RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PON	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL	2025	2026	2027
5289	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6702	Penguatan Diplomasi Kebahasaan	67.101.172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	67.101.172,0	69.114.207,0	71.187.638,0	73.323.259,0
	Total	279.875.420,0	969.975,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280.845.395,0	280.069.784,0	288.079.149,0	296.328.579,0

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Endang Aminudin Aziz, MA., Ph.D

NP 196711161992031001

22 Agustus 2024

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Endang Aminudin Aziz, MA., Ph.D

NP 196711161992031001

C. Perjanjian Kinerja

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman penyusunan IKU di lingkungan instansi pemerintah, Sekretariat Badan Bahasa menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Kerangka Pendanaan pada Rencana Strategis Tahun 2020—2024 berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Kode	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan				
		2020	2021	2022	2023	2024
023.WA	Dukungan Manajemen					
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	150,8	294,9	320	352	387

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target Renstra					Target PK	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra								
Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	Predikat	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB
Jumlah Satker yang dibina menuju WBK	Satker	5	2	2	2	2	5	
Jumlah Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker							2
Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	Nilai	91	92	93	94	95	91	92

Di tahun 2022 terdapat perubahan target dan sasaran pada Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 tahun 2022 tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024. Berikut matrik target IKK berdasarkan Renstra Revisi Tahun 2020—2024 dan Perjanjian Kinerja.

Kode	Program/Kegiatan	Indikasi Kebutuhan Pendanaan		
		2022	2023	2024
023.WA	Dukungan Manajemen			
2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	283	358	401

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (2020)	Target Renstra			Target PK		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra								
Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	69,70	75,75	78,80	81,80	75,75	78,80	97

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Angka Dasar (2020)	Target Renstra			Target PK		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	5	5	5	5	5	5	10

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021, penentuan target selanjutnya berdasarkan dengan hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya. Sehingga terdapat perbedaan target pada Rencana Strategis tahun 2020—2024 dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Hasil capaian kinerja indikator kinerja kegiatan Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB dan Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM tercapai masing-masing 100% atau sebesar 126,90% dan 9 satker atau sebesar 180%. Penetapan target berdasarkan capaian tahun 2023 ditetapkan target per indikator seperti tabel tersebut di atas.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Bahasa tahun 2024.



Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hafidz Muksin
Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
 untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
 selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
E. Aminudin Aziz
NIP 19671110199031001

Jakarta, 15 Februari 2024

Sekretaris Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Hafidz Muksin
NIP 197001221990011001

Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[1.1] Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	97
[1.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[1.2] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	10

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 158.510.066.000,-
Total Anggaran			Rp. 158.510.066.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
E. Aminudin Aziz
NIP 19671110199031001

Sekretaris Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,

Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Hafidz Muksin
NIP 197001221990011001

Berikut ringkasan revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Bahasa tahun 2024.



**Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretaris Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hafidz Muksin
Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : E. Aminudin Aziz
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
E. Aminudin Aziz

Jakarta, 12 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Hafidz Muksin

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatkan tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	(IKK 1.1) Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	97
	(IKK 1.2) Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat 21-WBK/WBEM	Satker	10

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp 152.908.251.000
Total Anggaran			Rp 152.908.251.000

Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
E. Aminudin Aziz

Jakarta, 12 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Hafidz Muksin

Berikut beberapa penyebab penyesuaian anggaran sehingga dilakukan revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat Badan Bahasa di tahun 2024.

1. Pemenuhan kekurangan belanja operasional (002) di Satker Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa, Kantor Sulawesi Tenggara, Kantor NTB, dan Maluku yang diambilkan dari belanja 001 (gaji) Sekretariat badan Bahasa,
2. Pergeseran anggaran antar program, antar KRO/RO, antar jenis belanja dalam satu unit Eselon I yang sama yaitu belanja operasional (belanja gaji) ke selain belanja operasional (belanja barang kelompok akun 526),
3. revisi berupa pengalihan anggaran belanja modal dari Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar ke Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan
4. Pengalihan kelebihan anggaran belanja pegawai dari seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa ke Sekretariat Badan Bahasa.

Sehingga penyesuaian alokasi anggaran pada Perjanjian Kinerja tahun 2024 dari anggaran sebesar Rp158.510.066.000,00 menjadi Rp152.908.251.000,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp149.104.009.473,00 atau sebesar 99,36% tanpa blokir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

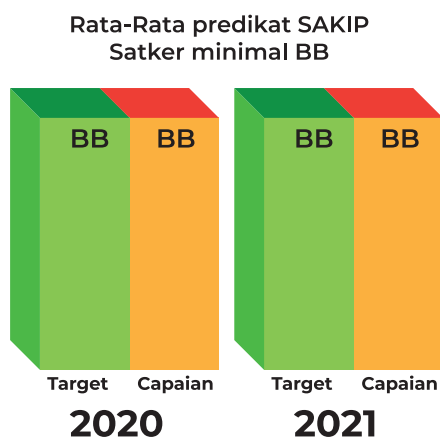
A. Akuntabilitas Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Sekretariat Badan Bahasa menetapkan 1 Sasaran Kegiatan dengan 2 indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan kerja dan kinerja Sekretariat Badan Bahasa. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2024.

Sasaran Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar	Target			Target Renstra 2024
			Target	Capaian	%	
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	69,70	97	100	103,09	81,8
	Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	5	10	12	120	5

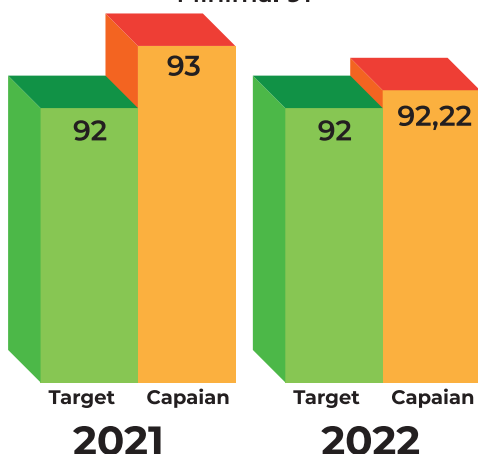
Sasaran Kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Renstra Kemendikbud, Sekretariat Badan Bahasa melakukan upaya peningkatan Tata Kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Bahasa ditandai dengan target indikator kinerja kegiatan Rata-Rata predikat SAKIP Satker minimal BB, Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK, Jumlah Satker yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM, dan Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91, yang tercapai secara optimal di tahun 2020—2021.



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan evaluasi kinerja internal. Capaian indikator Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB di tahun 2020—2021 dapat dicapai dengan baik oleh Sekretariat BPP Bahasa, dengan rata-rata skor nilai 73,56 (tahun 2020) dan 77,80 (tahun 2021) dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen. Hal ini diperkuat dengan ketercapaian indikator kinerja kegiatan Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91, dengan nilai NKA 93 di tahun 2020 dan 92,22 di tahun 2021.

Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91



Namun terdapat satu indikator yang mengalami perubahan nomenklatur di tahun 2021, yaitu Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK di tahun 2020, menjadi Jumlah Satker yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM di tahun 2021. Hal ini karena adanya perubahan kebijakan bahwa setelah satker di Badan Bahasa diusulkan di tahun sebelumnya, perlu adanya peningkatan target di tahun selanjutnya. Sehingga upaya tersebut perlu didukung dengan meningkatkan indikator kinerja kegiatan menjadi Jumlah Satker di yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM.

Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK



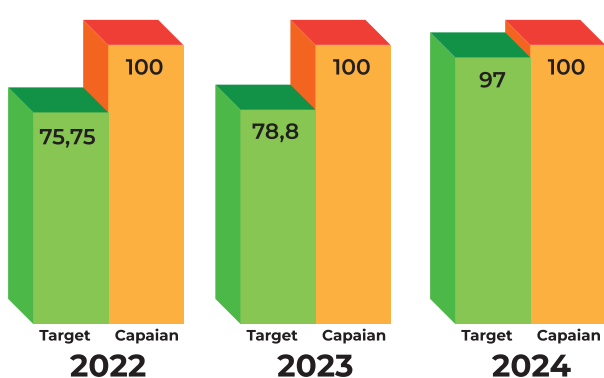
Jumlah Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Di tahun 2022 terjadi perubahan nomenklatur Kementerian yang turut mengubah seluruh arah dan kebijakan terutama pada dokumen Rencana Strategis. Dampak tersebut diikuti dengan dilakukannya revisi Rencana Strategis Kemendikbud tahun 2020—2024. Perubahan tersebut diikuti dengan perubahan pada nomenklatur dan target sasaran strategis, program, dan kegiatan pada Renstra yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan Tahun 2020-2024.

Perubahan kebijakan ini tidak mempengaruhi keberhasilan Sekretariat Badan Bahasa dan satker di lingkungan Badan Bahasa lainnya. Hal ini ditandai dengan meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa yang didukung dari peningkatan hasil kinerja indikator persentase satker yang memiliki predikat SAKIP minimal BB dan jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM di lingkungan Badan Bahasa dengan cukup memuaskan setiap tahunnya. Terlihat dari grafik ketercapaian yg meningkat dr tahun 2022-2024.

Capaian Persentase Satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal BB di Badan Bahasa 2022--2024



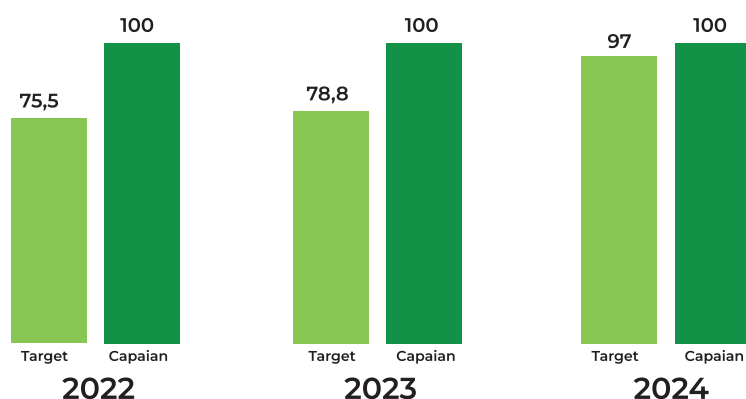
Capaian Jumlah Satker di Badan Bahasa yang diusulkan mendapatkan Predikat Zi-WBK/WBBM 2022--2024



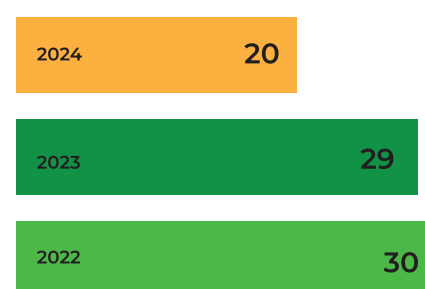
Ketercapaian ini yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 mengalami kenaikan yang signifikan sehingga dapat berdampak positif terhadap perubahan budaya kinerja dan kerja dengan suasana semakin positif dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dibuktikan melalui:

1. Akuntabilitas Kinerja semakin meningkat yang ditunjukkan melalui progres nilai SAKIP satker Badan Bahasa sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.
2. Tren Penurunan Disiplin Pegawai sejak tahun 2022—2024.
3. Penurunan Tindak Lanjut Hasil Temuan tahun 2020—2023.

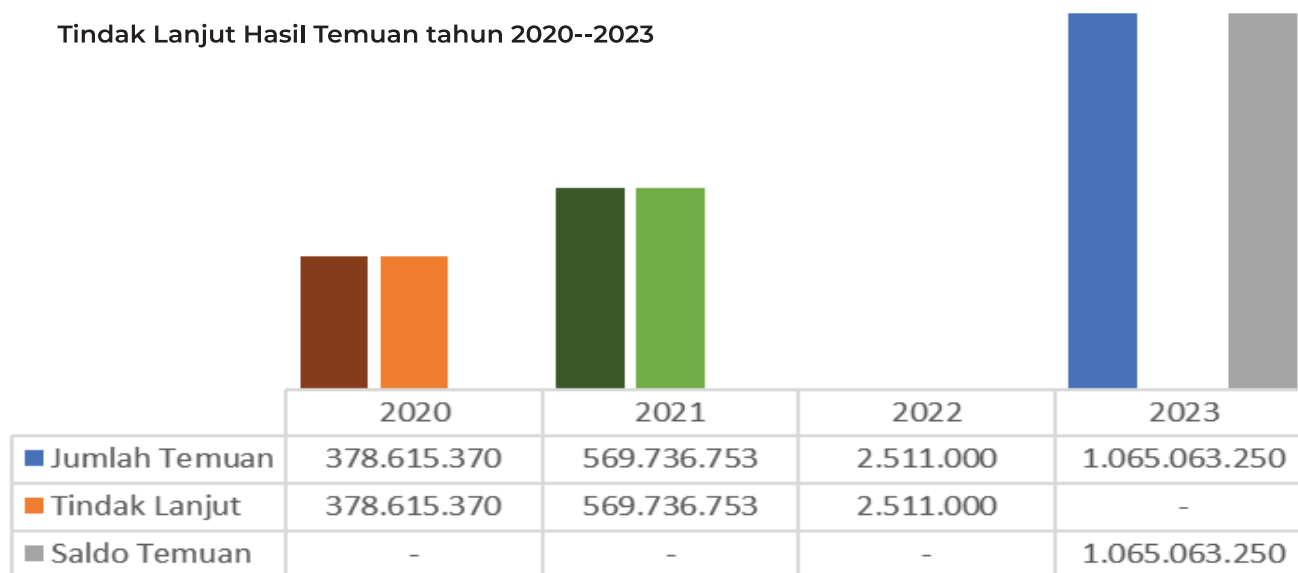
Akuntabilitas Kinerja semakin meningkat yang ditunjukkan melalui progres nilai SAKIP satker Badan Bahasa sejak tahun 2022—2024



Tren Penurunan Disiplin Pegawai sejak tahun 2022—2024



Tindak Lanjut Hasil Temuan tahun 2020--2023



Berikut penjelasan indikator kinerja kegiatan yang mendukung ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

IKK 1

IKK Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB

Penilaian indikator Kinerja Rata-Rata Predikat SAKIP satker Minimal BB berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, terdiri dari komponen evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Diperoleh Rata-Rata Predikat SAKIP seluruh satker ditargetkan memperoleh nilai minimal BB atau sangat memuaskan dengan rentang nilai pada angka >70-80.

Evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan BPP Bahasa telah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

Metode penilaian evaluasi SAKIP dihitung berdasarkan total nilai SAKIP seluruh satker dibagi jumlah satker. Berikut rumus perhitungan nilai SAKIP:

Tabel 1

Target dan Capaian IKK Sekretariat Badan Bahasa Tahun 2020—2021

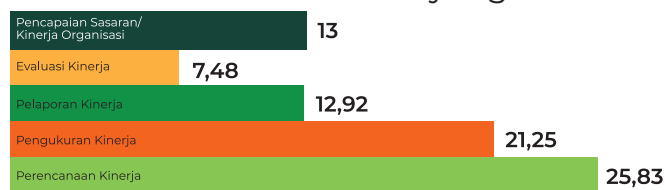
SK	IKK	2020			2021			Target 2024
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB	100	BB	BB	100	BB

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemendikbud 2020—2024, ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dan 2021 bahwa Sekretariat Badan Bahasa memiliki target satu sasaran kegiatan yang didukung oleh 3 indikator kinerja kegiatan dengan target dan capaian kinerja seperti yang tersaji pada tabel target dan capaian IKK Sekretariat Badan Bahasa tahun 2020—2021. Penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, terdiri dari komponen berikut.

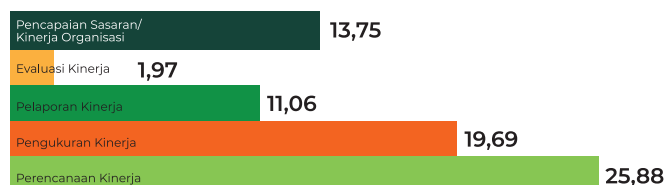


Berdasarkan hasil evaluasi AKIP dari Inspektorat Jenderal dan Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 33 satker di lingkungan Badan Bahasa telah berhasil meraih nilai AKIP sebagai berikut.

Berikut peningkatan nilai evaluasi AKIP secara agregat di lingkungan Badan Bahasa tahun 2020—2021 yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan Bahasa.



Terlihat peningkatan nilai hasil evaluasi AKIP tahun 2020 dan 2021 seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa telah melaksanakan kinerja secara optimal dan akuntabel.



Strategi yang mendukung ketercapaian indikator tersebut di atas sepanjang tahun 2020—2021, yaitu.

Melakukan sinkronisasi data antara Sekretariat BPP Bahasa dengan Biro Perencanaan sebelum penentuan nilai akhir evaluasi SAKIP ditetapkan.

Melakukan pendampingan dan monitoring ke satker di lingkungan Badan Bahasa dalam rangka penyiapan dokumen data dukung SAKIP dan finalisasi nilai pada saat masa sanggah hasil evaluasi AKIP.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2020—2021 tersebut merupakan standar ukur adanya peningkatan tata kelola satker-satker di lingkungan Badan Bahasa sampai dengan tahun 2021. Keberhasilan capaian kinerja di tahun 2020—2021 menjadi keberlanjutan penetapan target indikator dengan nomenklatur berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu pengukuran akuntabilitas kinerja satker di lingkungan Badan Bahasa.

**Rata-Rata
Nilai SAKIP**



Total Nilai Sakip Satker

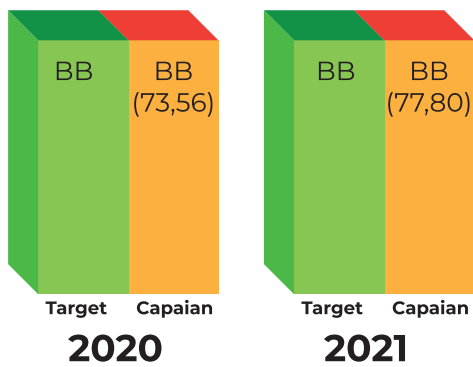
**Jumlah Seluruh Satker
BPP Bahasa**

Capaian indikator Rata-Rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB di tahun 2020 dapat dicapai dengan baik oleh seluruh satker di Badan Bahasa, dengan rata-rata skor nilai 73,56 dengan interpretasi sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, dan memiliki sistem manajemen

Tabel 2

Target dan Capaian IKK Sekretariat Badan Bahasa Tahun 2022—2024

SK	IKK	2020			2021			Target 2024
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Bahasa	Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	BB	BB (73,56)	100	BB	BB (77,80)	100	BB



Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2021, rata-rata skor nilai satker sebesar 77,80. Nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 4,24 persen jika dibandingkan dengan rata-rata skor nilai pada tahun 2020 sebesar 73,56. Berikut hasil penilaian evaluasi AKIP satker di lingkungan Badan Bahasa tahun 2020—2021.

No.	Nama Satker	2020		2021	
		Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat
1	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	73,56	BB	80,48	A
2	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	72,35	BB	80,48	A
3	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	83,48	A	86,77	A
4	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	69,13	B	73,68	BB
5	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	-	-	-	-
6	Balai Bahasa Provinsi Aceh	69,31	B	71,97	BB
7	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	73,57	BB	74,41	BB
8	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	69,72	B	72,77	BB
9	Balai Bahasa Provinsi Riau	77,78	BB	80,42	A
10	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	80,31	A	80,83	A
11	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	80,76	A	82,85	A
12	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	78,47	BB	86,15	A
13	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	80,15	A	82,91	A
14	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	67,92	B	72,33	BB
15	Balai Bahasa Provinsi Bali	80,76	A	87,27	A
16	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	69,04	B	71,98	BB
17	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	74,00	BB	89,53	A
18	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	62,14	B	63,84	B
19	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	73,57	BB	79,65	BB
20	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	71,19	BB	74,84	BB
21	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	74,14	BB	76,85	BB
22	Balai Bahasa Provinsi Papua	44,63	C	66,44	B
23	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	71,72	BB	72,19	BB
24	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	69,2	B	72,91	BB
25	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	67,92	B	75,92	BB
26	Balai Bahasa Provinsi Jambi	75,95	BB	77,93	BB
27	Balai Bahasa Provinsi Maluku	72,76	BB	75,58	BB
28	Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara	76,29	BB	80,74	A
29	Balai Bahasa Provinsi Lampung	80,16	A	81,6	A
30	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	81,9	A	82,53	A
31	Balai Bahasa Provinsi Bengkulu	72,68	BB	75,17	BB
32	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	70,94	BB	76,32	BB
33	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	68,58	B	74,57	BB
34	Kantor Bahasa Provinsi Banten	78,61	BB	83,25	A
35	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	78,7	BB	82,98	A

Secara agregat peningkatan nilai evaluasi AKIP di lingkungan Badan Bahasa tahun 2020—2021 yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Badan Bahasa terlihat pada tren nilai per komponen penialain AKIP. Terlihat peningkatan nilai hasil evaluasi AKIP tahun 2020 dan 2021 seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa telah melaksanakan kinerja secara optimal dan akuntabel.

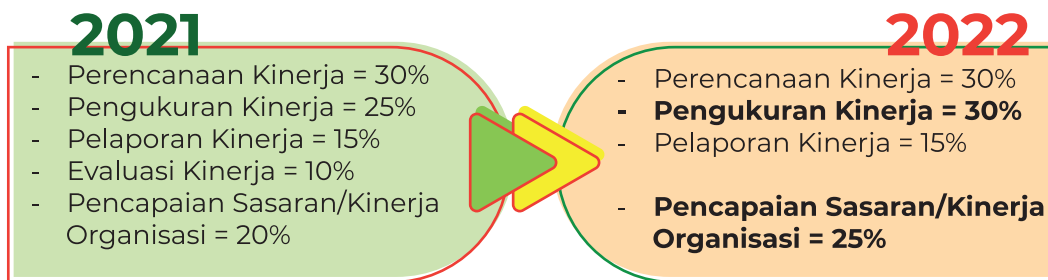
Strategi yang mendukung ketercapaian indikator tersebut di atas sepanjang tahun 2020—2021, yaitu.

1. Melakukan sinkronisasi data antara Sekretariat BPP Bahasa dengan Biro Perencanaan sebelum penentuan nilai akhir evaluasi SAKIP ditetapkan.
2. Melakukan pendampingan dan monitoring ke satker di lingkungan Badan Bahasa dalam rangka penyiapan dokumen data dukung SAKIP dan finalisasi nilai pada saat masa sanggah hasil evaluasi AKIP.

Keberhasilan capaian kinerja tahun 2020—2021 tersebut merupakan standar ukur adanya peningkatan tata kelola satker-satker di lingkungan Badan Bahasa sampai dengan tahun 2021. Keberhasilan capaian kinerja di tahun 2020—2021 menjadi keberlanjutan penetapan target indikator dengan nomenklatur berbeda namun memiliki tujuan yang sama, yaitu pengukuran akuntabilitas kinerja satker di lingkungan Badan Bahasa.

Keberhasilan di tahun 2020—2021 berlanjut di tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Meskipun terjadi perubahan nomenklatur indikator kinerja kegiatan sebagai akibat dari perubahan nama Kementerian, perubahan ini dilakukan dalam rangka memudahkan penghitungan capaian indikator. Peraturan yang mendasari perubahan tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dasar penilaian evaluasi AKIP semula menggunakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi, menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi. Dasar perubahan peraturan perundang-undangan ini ikut mempengaruhi perubahan target dan definisi operasional. Berikut sandingan perubahan komponen dan bobot penghitungan tiap komponen.

Di tahun 2022—2023, satker yang memiliki predikat SAKIP minimal BB sejumlah 33 satker dari total 35 satker di lingkungan Badan Bahasa atau sebesar 97,06%. Hal ini karena terdapat satu satker eselon 2 baru yaitu Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa. Sehingga di tahun 2022 tidak dapat dilakukan penilaian karena ketiadaan dokumen pembandingan dengan tahun sebelumnya. Di tahun 2023, Pustanda melalui penilaian evaluasi AKIP pertama dan mendapatkan predikat BB. Sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, 100% satker di lingkungan Badan Bahasa telah mendapatkan predikat minimal BB. Berikut penjelasan ketercapaian indikator kinerja Persentase Satker di Badan Bahasa yang Mendapatkan Predikat SAKIP Minimal BB sampai dengan tahun 2024.



Indikator kinerja kegiatan ini digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja instansi satker di lingkungan Badan Bahasa penyelenggaraan kinerja yang diukur melalui predikat minimal “BB”, sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan Sekretariat Badan Bahasa.

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014, SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 70–80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel. Berikut metode hitung berdasarkan dokumen definisi operasional Sekretariat Badan Bahasa.

Metode Hitung:

Nilai SAKIP Berdasarkan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 = perencanaan kinerja (30%) + pengukuran kinerja (30%) + pelaporan (15%) + evaluasi kinerja internal (25%)

Rumus Hitung :

$$\% \text{ satker yang predikat SAKIP-nya BB} = \frac{\text{Jumlah Satuan Kerja yang Nilai SAKIPnya minimal BB}}{\text{Jumlah Seluruh Satker BPP Bahasa}} \times 100\%$$

Berikut tren capaian kinerja berdasarkan definisi operasional dan metode hitung Renstra Revisi Tahun 2020—2024.

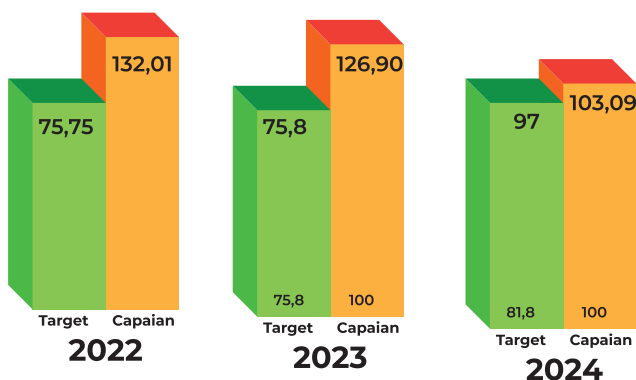
Tabel 3

Target dan Capaian IKK Sekretariat Badan Bahasa Tahun 2022—2024

SK/IKK	Satuan	2022			2023		
		Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	75,75	100	132,01	78,8	100	126,904

SK/IKK	Angka Dasar 2020	Satuan	2024			Target Renstra 2024
			Target	Capaian	%	
Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	69,70	%	97	100	103,1	81,8

Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB



Capaian Persentase Satker di Badan Bahasa yang Memiliki Predikat SAKIP minimal BB dapat terealisasi dengan baik melalui pendampingan tim SAKIP di Sekretariat Badan Bahasa sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Hal ini dibuktikan melalui jumlah satker di lingkungan Badan Bahasa yang mendapatkan predikat minimal BB di tahun 2022 dari target 75,75% tercapai sebesar 100% atau sebesar 132,01%. Di tahun 2023, capaian IKK mengalami peningkatan skor pada tahun 2023

dengan target 78,8% tercapai sebesar 100% atau sebesar 129,90%. Tahun 2024, target Persentase Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang Memiliki Predikat SAKIP minimal BB sebesar 81,80% dan tercapai sebesar 100% atau 103,1%.

Tabel 4

**Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Satker
Tahun 2022—2024**

No.	Nama Satker	2022		2023		2024	
		Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat	Total Nilai	Predikat
1	Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	90,00	A	90,00	A	91,15	AA
2	Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	90,00	A	90,00	A	90,00	A
3	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	84,90	A	82,40	A	86,20	A
4	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	84,25	A	88,90	A	89,10	A
5	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	-	-	74,05	BB	80,90	A
6	Balai Bahasa Provinsi Aceh	86,55	A	89,15	A	90,00	A
7	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	84,70	A	87,15	A	88,50	A
8	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	80,50	A	83,10	A	83,95	A
9	Balai Bahasa Provinsi Riau	81,70	A	80,95	A	84,30	A
10	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan	82,75	A	85,30	A	83,70	A
11	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	87,10	A	88,15	A	90,00	A
12	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	88,50	A	89,00	A	90,00	A
13	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	82,60	A	84,70	A	88,50	A
14	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	83,10	A	84,10	A	86,25	A
15	Balai Bahasa Provinsi Bali	88,05	A	89,25	A	83,50	A
16	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat	82,60	A	83,65	A	88,15	A

17	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah	89,25	A	90,00	A	90,00	A
18	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan	80,15	A	85,30	A	86,20	A
19	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	85,15	A	86,00	A	86,40	A
20	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah	81,85	A	90,00	A	90,00	A
21	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	81,90	A	90,00	A	90,00	A
22	Balai Bahasa Provinsi Papua	85,00	A	87,60	A	85,95	A
23	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	85,00	A	89,10	A	90,00	A
24	Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Timur	82,00	A	83,20	A	87,75	A
25	Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur	82,90	A	87,25	A	88,50	A
26	Balai Bahasa Provinsi Jambi	82,65	A	86,85	A	90,00	A
27	Balai Bahasa Provinsi Maluku	84,70	A	86,25	A	87,60	A
28	Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara	88,30	A	89,05	A	90,00	A
29	Balai Bahasa Provinsi Lampung	84,10	A	85,50	A	90,00	A
30	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara	84,30	A	86,10	A	88,85	A
31	Balai Bahasa Provinsi Bengkulu	84,70	A	85,50	A	86,40	A
32	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau	87,45	A	88,05	A	88,35	A
33	Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	88,00	A	88,35	A	88,00	A
34	Kantor Bahasa Provinsi Banten	84,10	A	85,15	A	88,00	A
35	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	83,20	A	83,70	A	86,10	A

Penyebab keberhasilan dari capaian indikator ini tidak terlepas dari komitmen kepala satker dalam menerapkan akuntabilitas kinerja di masing-masing satker serta upaya dan kerja keras dari tim Sekretariat BPP Bahasa dalam melakukan upaya pendokumentasian dan pendampingan atas implementasi AKIP sejak tahun 2022—2024 di setiap satker di lingkungan Badan Bahasa. Komitmen setiap petugas pelaporan dalam memenuhi pendokumentasian data dukung hasil implementasi AKIP dan seluruh pegawai. Berikut upaya-upaya dan penyebab keberhasilan yang dilakukan oleh tim Evaluasi AKIP di lingkungan Sekretariat Badan Bahasa untuk dapat mencapai target indikator kinerja kegiatan Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB.

1. Melakukan sosialisasi untuk implementasi AKIP di seluruh satker
2. Mengoordinasi dan mengarahkan seluruh satker di Badan Bahasa untuk mendokumentasikan data dukung implementasi AKIP ke lokasi penyimpanan daring
3. Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan untuk mengamodasi seluruh satker terkait dengan sosialisasi pedoman evaluasi AKIP yang telah disusun oleh Inspektorat Jenderal, Kemendikbudristek
4. Melakukan pertemuan bersemuka antara tim evaluator AKIP dan satker di lingkungan Badan Bahasa dalam rangka upaya sanggah hasil evaluasi AKIP TA 2024
5. Berkoordinasi dengan tim evaluator untuk mengawal hasil nilai evaluasi AKIP seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa TA 2024

Dukungan dari setiap layanan tersebut tentu mendapatkan kendala/hambatan dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan, yaitu.

1. Rekomendasi dari setiap indikator laporan kinerja tahun sebelumnya belum memiliki instrumen ceklis hasil tindaklanjut di tahun sebelumnya di tahun

berjalan untuk setiap layanan. Sehingga belum ada fungsi kontrol yang optimal untuk hambatan/kendala setiap layanan.

2. Aplikasi spasikita yang terkena gangguan PDN sehingga seluruh dokumen yang otomatis disediakan melalui aplikasi Spasikita hilang.

Terhadap kendala/hambatan tersebut, tim Evaluasi AKIP melakukan langkah antisipasi, sebagai berikut.

1. Menyusun rencana tindak lanjut berdasarkan catatan kendala/hambatan serta rekomendasi setiap layanan di Sekretariat Badan.
2. Menyiapkan lokasi penyimpanan mandiri digital dan penyimpanan eksternal.

Langkah antisipasi tersebut juga didukung oleh strategi-startegi keberhasilan yang dilakukan oleh tim dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan

No.	Strategi Keberhasilan
1.	Menyusun rencana perubahan kebijakan terkait anggaran
2.	Menindaklanjuti seluruh rencana tindak lanjut
3.	Sosialisasi dan diklat pegawai di lingkungan Badan Bahasa terkait SAKIP
4.	Menyiapkan lokasi penyimpanan mandiri yang dikompilasi Biro Perencanaan

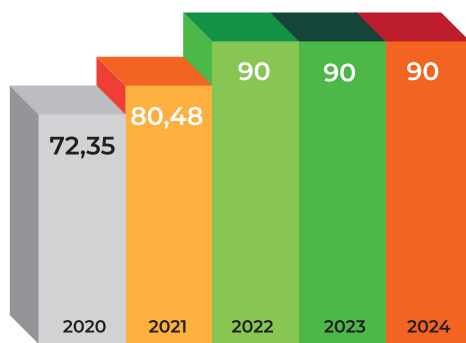


Penghargaan Penyelenggaraan SAKIP Sekretariat Badan Bahasa TA 2022 pada Maret 2023

Capaian keberhasilan indikator persentase satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal BB di lingkungan Badan Bahasa menjadi praktik baik bagi seluruh satker di lingkungan Kemendikbudristek yang dibuktikan melalui kunjungan Unit Utama Pusat Data dan Informasi, Kemendikbudristek untuk melaksanakan patok banding ke Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023. Sejalan dengan keberhasilan capaian kinerja Badan

Bahasa terkait nilai SAKIP, hasil nilai evaluasi AKIP Sekretariat Badan di tahun 2022 sampai dengan 2024 adalah 90 dengan predikat A. Nilai AKIP 90 di tahun 2022 yang membawa Sekretariat Badan Bahasa mendapatkan penghargaan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim, yaitu Penghargaan Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 pada Kategori Unit Organisasi Eselon II dengan nilai 90,00 (predikat A). Di tahun 2023, Sekretariat Badan Bahasa berhasil mempertahankan nilai Evaluasi AKIP sebesar 90 atau predikat A. Hasil nilai ini tidak terlepas dari komitmen kepala satker dan upaya tim SAKIP Sekretariat Badan Bahasa serta seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Badan Bahasa dalam mewujudkan sistem pemerintah yang akuntabel.

Tren Capaian Nilai SAKIP
Sekretariat Badan Bahasa
Tahun 2020—2024



Tim Evaluasi AKIP Sekretariat Badan Bahasa melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait implementasi AKIP yang mendapatkan kontribusi hasil pelaksanaan aktivitas setiap layanan baik dari perencanaan program dan anggaran, evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, akuntansi pelaporan keuangan, data dan informasi, hubungan masyarakat dan publikasi, kerja sama, sumber daya manusia, dan barang milik negara, di seluruh komponen pendukung SAKIP, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi

internal.

Berikut penjelasan capaian kinerja setiap layanan di Sekretariat Badan Bahasa yang mendukung keberhasilan ketercapaian indikator kinerja kegiatan di tahun 2024.

a. Layanan Evaluasi

Aktivitas yang dilakukan oleh layanan evaluasi dalam mendukung ketercapaian target indikator persentase satker yang memiliki predikat SAKIP minimal BB tahun 2022—2024, yaitu, melaksanakan koordinasi pendampingan penyusunan laporan kinerja (Lakin), mengimplementasikan manajemen risiko, evaluasi program dan anggaran secara berkala baik bulanan, triwulan, semester, maupun tahunan, melakukan upaya optimalisasi nilai kinerja anggaran, evaluasi dan reviu Renstra BPP Bahasa tahun 2022—2024, dan mengkoordinasi evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Badan Bahasa dari tahun 2022—2024. Seluruh output hasil kegiatan tersebut mendukung komponen-komponen penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tim evaluasi dengan mendukung upaya-upaya keberhasilan ketercapaian indikator kinerja kegiatan Persentase Satker yang memperoleh predikat SAKIP minimal BB dengan mengoordinasi dan mengawal upaya pendokumentasian ke Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal selaku pendamping dan evaluator AKIP, serta melakukan pendampingan ke seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa.

Kendala atau hambatan yang dialami oleh layanan evaluasi dalam mendukung ketercapaian IKK adalah

1. Saat menentukan target tahun 2024, satker mengalami kendala dalam menetapkan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 karena harus lebih tinggi berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2023 dengan kondisi satu satker baru yang memulai penilaian di tahun 2023.
 2. Pola pendampingan ke satker yang belum memunculkan inovasi kebaruaran.
- Langkah Antisipasi
1. Mendampingi satker baru secara intensif dalam berbagai bentuk konsinyasi dan koordinasi, baik bersemuka maupun daring.
 2. Melakukan pertemuan pada masa sanggah antara satker pendampingan dengan seluruh tim evaluator untuk melakukan konfirmasi data dukung.

Berikut informasi linimasa pelaksanaan aktivitas layanan evaluasi pelaksanaan dan program dalam mendukung ketercapaian IKK SAKIP.



b. Layanan Perencanaan

Aktivitas di tim perencanaan dalam mendukung ketercapaian target indikator SAKIP tahun 2024 yaitu, mengoordinasi penyusunan program dan anggaran sesuai dengan siklus perencanaan, menginisiasi penyusunan indeks pembangunan kebahasaan (IPBas) yang merupakan instrumen dan basis formulasi kebijakan bidang Kebahasaan dan kesastraan, penyusunan standar biaya SBML (Standar Biaya Masukan Lainnya), SBKK (Standar Biaya Keluaran Khusus), sampai dengan SBKU (Standar Biaya Keluaran Umum) sebagai langkah optimalisasi NKA satker di lingkungan Badan Bahasa, penyusunan dan perumusan Renstra Badan Bahasa TA 2025—2029 dan meningkatkan penajaman program prioritas Badan Bahasa, serta mengupayakan sinkronisasi program dan kegiatan antara pusat dan daerah (kewenangan konkuren pusat dan daerah).

Dalam melakukan aktivitas tersebut, tim perencanaan melakukan kolaborasi dengan seluruh tim di Sekretariat Badan Bahasa, Tim KKLP, dan mitra kerja baik internal maupun eksternal yang memiliki keterkaitan fungsi untuk melakukan sinkronisasi program dan anggaran. Seluruh aktivitas ini yang akan menjadi dokumen dasar perencanaan program dan anggaran, oleh seluruh satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

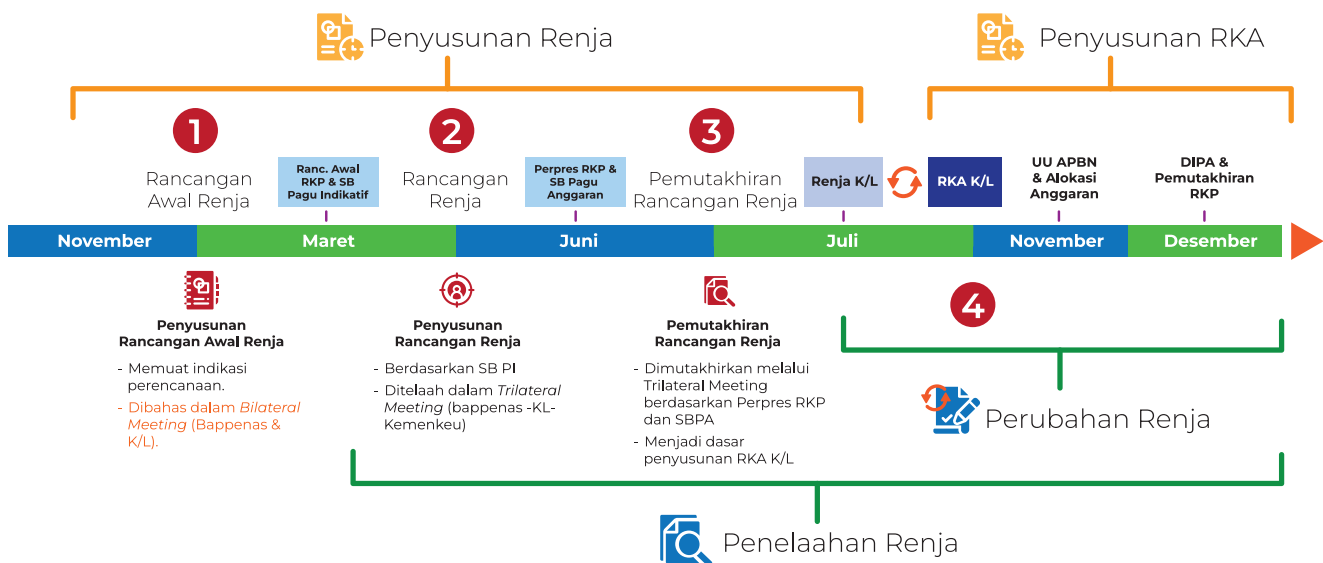
Berikut kendala/hambatan yang dialami oleh layanan perencanaan dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan SAKIP, yaitu.

1. Format Renja K/L yang diminta melalui aplikasi e-planning mengalami kendala aplikasi sedang dalam masa perbaikan pada saat akan unduh untuk diunggah data ke aplikasi Spasikita.
2. Tenggat waktu linimasa penyusunan anggaran tahun berikutnya (T+1) dan optimalisasi tahun berjalan (T0) dengan mitra internal dan eksternal Badan Bahasa yang berbeda.

Langkah Antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan, yaitu.

1. Mengunduh satu format Renja K/L melalui aplikasi Krisna Renja untuk dapat digunakan oleh seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa sebagai data dukung.
2. Berkoordinasi dengan mitra eksternal dan internal Badan Bahasa serta mengupayakan pertemuan bersemuka untuk dapat menepati tenggat waktu linimasa penyusunan dan optimalisasi program dan anggaran T+1 dan T0.

Berikut informasi linimasa pelaksanaan aktivitas layanan perencanaan program dan anggaran dalam mendukung ketercapaian IKK SAKIP.



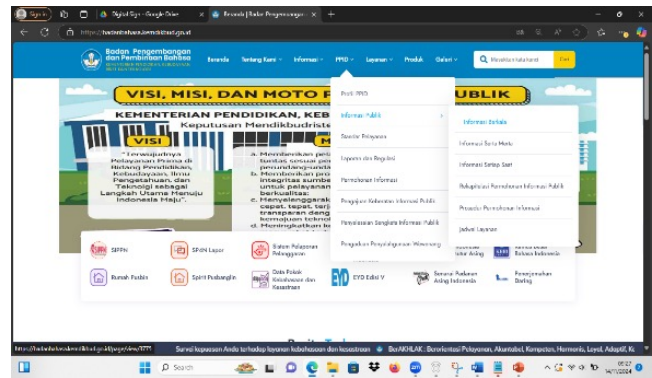
c. Layanan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan layanan selanjutnya yang mendukung ketercapaian di indikator kinerja kegiatan SAKIP. Aktivitas yang dilaksanakan seperti pengembangan layanan sistem informasi untuk mengembangkan, merawat, dan mengelola sistem informasi untuk menampilkan informasi publik, pengelolaan laman Badan Bahasa yang dikembangkan untuk menyesuaikan kebutuhan informasi publik, dan pengelolaan layanan data dan informasi untuk menghasilkan data pokok kebahasaan dan kesastraan yang terpadu.

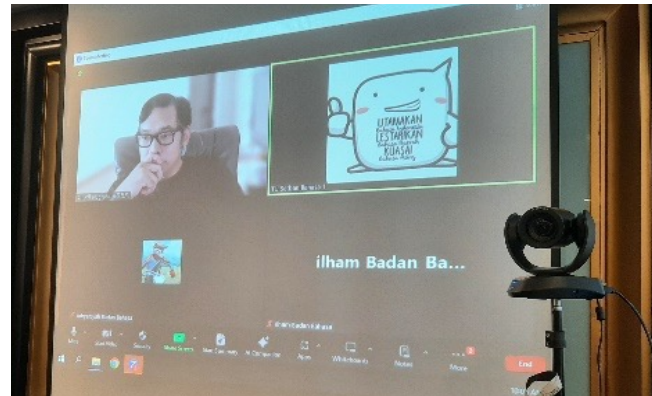
Di tahun 2024, tim data dan informasi menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) pada sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian seluruh pimpinan dan staf dalam menjaga stabilitas pelayanan informasi kepada masyarakat secara umum maupun kepada seluruh pegawai Badan Bahasa. Tujuan lain penerapan SMKI yaitu, menutup, membatasi, dan mengatasi celah serangan siber pada aplikasi atau laman-laman yang dikelola di lingkungan Badan Bahasa secara khusus. Tim bekerja sama dengan tenaga IT khusus untuk menguji kerentanan yaitu *Bug Hunter* untuk melakukan ujicoba guna mengetahui celah atau kerawanan yang ada pada aplikasi laman daring di lingkungan Badan Bahasa, seperti :

1. Laman Dapobas (Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan)
2. Laman GESIT (Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu)
3. Laman KBI (Kongres Bahasa Indonesia)
4. Laman Sidaks (Sistem Informasi Data Kebahasaan dan Kesastraan)
5. Laman Rumah Pusbin (Portal Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra)
6. Laman Peta Bahasa
7. Laman Registrasi Bahasa dan Sastra
8. Laman BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing)
9. Laman Penerjemahan Daring
10. Laman Spirit Pusbanglin (Portal Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra)

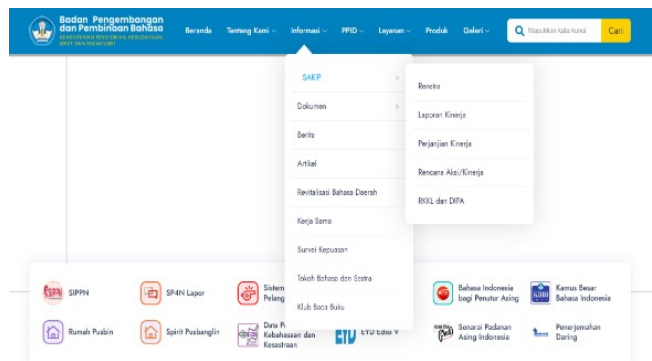
Integrasi data pada laman Badan Bahasa ini mempermudah aksesibilitas dan integrasi data dan informasi serta dapat meningkatkan efektivitas dan efisien dalam pelaporan dan evaluasi kinerja melalui platform digital. Data dan informasi yang tersaji pada laman mendukung akuntabilitas Sekretariat Badan Bahasa dalam meningkatkan transparansi informasi kepada publik/masyarakat umum atas capaian kinerja. Transparansi dan kemudahan dalam mengakses informasi publik merupakan amanah UU 14 tahun 2008 yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik. Sehingga di tahun 2025, setelah dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 244/P/2015 tentang PPID di Lingkungan Kemendikbud, dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Surat Keputusan Kepala Badan No 0132/11/HM.01.00/2024, Badan Bahasa bertanggungjawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Upaya yang didukung oleh layanan data dan informasi lainnya adalah pengembangan fitur penilaian pegawai pada aplikasi GESIT di tahun 2023 yang digunakan di tahun 2024. Berikut perubahan semula-menjadi.



Layanan Informasi Publik



Narasumber dari UI untuk fitur PPID



Fitur Publikasi Data Dukung SAKIP pada Laman Badan Bahasa

Bobot penilaian
tahun 2023
(semula)

1. Nilai SKP = 40%
2. Nilai Kehadiran = 10%
3. Penilaian 3600 = 50%



Bobot penilaian
tahun 2024
(semula)

1. Nilai SKP = 50%
2. Nilai Kehadiran = 10%
3. Penilaian 3600 = 40%

Pada tahun 2024 setiap pegawai dapat mengisi formulir data diri sarana untuk menyampaikan informasi yang berkaitan dengan capaian prestasi dan deskripsi diri. Dengan adanya fitur ini diharapkan pegawai lain menilai pegawai yang bersangkutan lebih jelas, karena dapat membaca informasi data diri pegawai lain yang akan mereka nilai.

Hal lainnya, yaitu informasi publik yang dikelola untuk mendukung ketercapaian indikator persentase SAKIP berpredikat minimal BB terkait ketersediaan fitur SAKIP pada menu informasi pada laman Badan Bahasa. Sehingga seluruh data dan informasi yang mendukung pendokumentasian data dukung SAKIP sejak tahun 2015—2024 telah diunggah dengan apik pada menu informasi pada fitur SAKIP di laman Badan Bahasa.

Berikut kendala/hambatan yang dialami oleh layanan data dan informasi dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan SAKIP, yaitu.

1. Tenaga IT belum mengakomodasi insiden serangan siber laman dan aplikasi di lingkungan Badan Bahasa.
2. Data capaian kebahasaan dan kesastraan yang masih beranekaragam jumlahnya dari berbagai sumber yang menyebabkan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perencanaan tidak relevan.

Langkah Antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan, yaitu

1. Menjalani kerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam pengujian dan kerentanan menangani serangan siber.
2. Melakukan validasi dan sinkronisasi data di tiap Satuan Kerja.

Berikut informasi linimasa pelaksanaan aktivitas layanan data dan informasi dalam mendukung ketercapaian IKK SAKIP.



d. Layanan SDM

Aktivitas di layanan SDM yang mendukung ketercapaian IKK Persentase Satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal BB yaitu Pengembangan Kompetensi pegawai di lingkungan Badan Bahasa sesuai dengan jabatan, perencanaan SDM berbasis kinerja sesuai dengan rencana strategis Badan Bahasa, pengelolaan kinerja individu, pengelolaan penghargaan pegawai terbaik, dan pembinaan budaya kerja di lingkungan Badan Bahasa, khususnya di Sekretariat Badan Bahasa. Pengembangan kompetensi pegawai bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kapasitas SDM dalam pengambilan keputusan, mengelola perubahan, komunikasi yang efektif serta berorientasi pada hasil melalui penerapan

nilai dasar ASN Ber-AKHLAK dan budaya KSATRIA di lingkungan Badan Bahasa serta untuk mempersiapkan calon pejabat fungsional tertentu agar mendapatkan pemahaman dan pengetahuan tentang peran dan tugasnya sehingga dapat menjalankan tugasnya secara profesional.



Narasumber dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) dengan materi Peningkatan kompetensi dan profesionalisme ASN dalam menghadapi tantangan dan perubahan di masa depan

Dalam rangka memotivasi pegawai dalam melaksanakan tugas, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mendorong peningkatan kinerja, Badan Bahasa memberikan penghargaan (*reward*) kepada pegawai yang berprestasi dan telah menerapkan nilai-nilai dasar BerAKHLAK. Upaya ini juga dilakukan dalam mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi bagi yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Penghargaan yang diberikan kepada pegawai berupa prioritas untuk menjadi pimpinan struktural satker di lingkungan Badan Bahasa. Hal ini menjadi pendorong bagi pegawai untuk terus meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab atas hasil yang dicapai, seiring dengan penerapan SAKIP yang mengutamakan akuntabilitas dan transparansi.



Pemilihan Pegawai Berprestasi Tahun 2024

Berikut kendala/hambatan yang dialami oleh layanan SDM dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan SAKIP, yaitu.

1. Peningkatan kompetensi pegawai belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas pegawai karena belum dilakukan analisis kebutuhan program peningkatan kompetensi untuk setiap individu pegawai.
2. Pemberian penghargaan atas kinerja pegawai di lingkungan Badan Bahasa belum memiliki formulasi penilaian berbasis capaian kinerja berdasarkan pengukuran kinerja individu.

Langkah Antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan, yaitu.

1. Menuangkan rencana peningkatan kompetensi pegawai dalam bentuk rencana pengembangan individu (RPI) yang disepakati oleh pegawai dan atasan.
2. Menyusun pedoman penilaian penghargaan pegawai berprestasi di lingkungan Badan Bahasa dan melakukan penilaian pegawai berprestasi melalui aplikasi.

Berikut informasi linimasa pelaksanaan aktivitas layanan SDM dalam mendukung ketercapaian IKK SAKIP.



e. Layanan Barang Milik Negara

Layanan barang milik negara melakukan aktivitas Sinkronisasi SIMAK BMN UPT, Pengelolaan BMN, Penyusunan Laporan Wasdal, Penyusunan RK BMN, dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa untuk mendukung ketercapaian IKK persentase SAKIP di lingkungan Badan Bahasa dengan predikat minimal BB. Strategi pengelolaan barang milik negara ini dalam mendukung ketercapaian IKK karena adanya penguatan koordinasi dan konsinyasi antara Sekretariat Badan dan satker dalam rangka pengembangan pemahaman, kompetensi, dan penyelarasan dengan ketentuan/Peraturan serta kepatuhan terhadap jadwal penyusunan RKBMN.

Pengelolaan aset negara yang optimal memiliki dampak positif terhadap nilai akuntabilitas yang tercermin dalam SAKIP. Hal ini dapat terlihat melalui kualitas data pada laporan kinerja yang akurat dan tepat tentang BMN, seperti status penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan aset negara. Layanan BMN yang baik memungkinkan penyusunan laporan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di tahun 2024, sebagai bentuk perwujudan amanah dari PMK113 tahun 2023 melalui Sekretariat Badan Bahasa, diusulkan Rincian Output Standar Biaya Keluaran Umum Barang Milik Negara di lingkungan Badan Bahasa. Hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan salah satu komponen Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yaitu implementasi dan efisiensi penggunaan RO SBKU BMN. 34 satker mengusulkan sisa anggaran dari aktivitas-aktivitas di layanan umum, program dukungan

manajemen (WA) untuk dianggarkan menjadi RO SBKU BMN. Revisi anggaran untuk diusulkan menjadi RO SBKU BMN

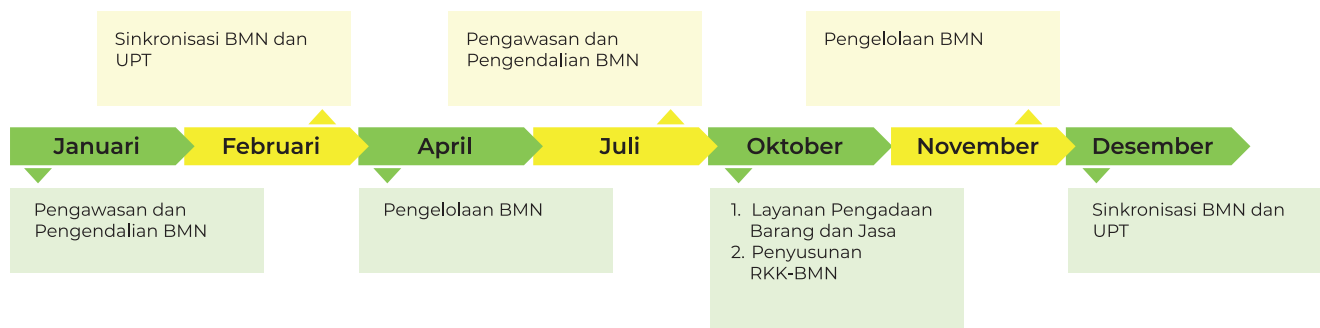
Berikut kendala/hambatan yang dialami oleh layanan BMN dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan SAKIP, yaitu.

1. Terdapat penambahan anggaran pada output operasional dan pemeliharaan Kantor hasil dari optimalisasi anggaran pada akhir tahun sehingga mengimbas pada pengelolaan BMN terutama pada proses TKTM dan berakibat pada pelaporan keuangan;
2. Kemampuan operator daerah yang masih kurang sehingga saat pemberlakuan aplikasi SIMAN Web versi 2, petugas BMN perlu melakukan penyesuaian dan peningkatan pemahaman berkelanjutan.
3. Belum adanya pedoman standar sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.

Langkah Antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan, yaitu.

1. Identifikasi dan pemetaan pekerjaan hasil optimalisasi;
2. Koordinasi dengan Satuan Kerja Pembina dan penyelenggaraan kegiatan BMN sehingga operator kemampuan dapat dioptimalkan.
3. Tersusunnya pedoman standar sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik.

Berikut informasi linimasa pelaksanaan aktivitas layanan BMN dalam mendukung ketercapaian IKK SAKIP.



f. Layanan Kehumasan dan Publikasi

Layanan humas dan publikasi dalam mendukung ketercapaian IKK melalui aktivitas konsolidasi kehumasan, promosi media luar ruang, MABBIM, dan Mastera. Aktivitas layanan publikasi yang dilaksanakan, yaitu penyusunan jurnal dan pengembangan publikasi digital.

Aktivitas di layanan humas dan publikasi ini meliputi pengelolaan media sosial, penyusunan konten, peliputan kegiatan kebahasaan dan kesastraan, koordinasi dan konsolidasi media, peningkatan wawasan di bidang layanan kehumasan, dan berbagai penyediaan sarana promosi untuk kegiatan di lingkungan Badan Bahasa, publikasi program kebahasaan dan kesastraan lewat media luar ruang, forum kebahasaan dan kesastraan di luar negeri, serta kegiatan publikasi program kebahasaan dan kesastraan melalui konten infografik dan audio visual.



Press Tour Kongres Pameran Kebahasaan dan Kesastraan 2024

Berikut kendala/hambatan yang dialami oleh layanan hubungan masyarakat dan publikasi dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan SAKIP, yaitu pemahaman kompetensi tim humas dan publikasi dalam mempublikasikan jenis data dan informasi dokumentasi yang perlu diinformasikan secara luas ke publik belum merata. Sehingga langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan, yaitu melakukan koordinasi dengan seluruh tim kerja terkait data dan informasi yang perlu dipublikasikan.

Llinimasa pelaksanaan aktivitas layanan humas dan publikasi dalam mendukung ketercapaian IKK SAKIP diaktualkan setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan publikasi dan kehumasan di lingkungan Badan Bahasa.

IKK 2

Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM

Satker adalah unit kerja di lingkungan Badan Bahasa yang terdiri dari: Pusat, Sekretariat Badan Bahasa, dan UPT. Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM adalah satker yang memenuhi 6 komponen pengungkit, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dasar Hukum yang digunakan Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Metode penghitungan : Jumlah satker yang dibina menuju ZI- WBK/ WBBM oleh Unit Eselon I

Tabel 5

Capaian ZI-WBK/WBBM Tahun 2020—2021

SK	IKK	2020			2021			Target 2024
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK	5	6,00	120	-	-	-	-
	Jumlah Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM				2	0	0,00	2

Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK



Jumlah Satker yang Mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM



Tahun 2020, nomenklatur indikator Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK, capaian kinerjanya sangat baik bahkan melebihi dari target yang ditetapkan, yaitu dari target sebanyak 5 satker yang dibina, tercapai sebanyak 6 satker yang dibina dan yang lolos mendapatkan predikat ZI-WBK sebanyak 1 satker. Enam satker tersebut diusulkan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai calon satuan kerja berpredikat WBK. Hal tersebut berdasarkan surat Kepala Badan Nomor 2572/11/OT/2020 tanggal 27 Mei 2020.

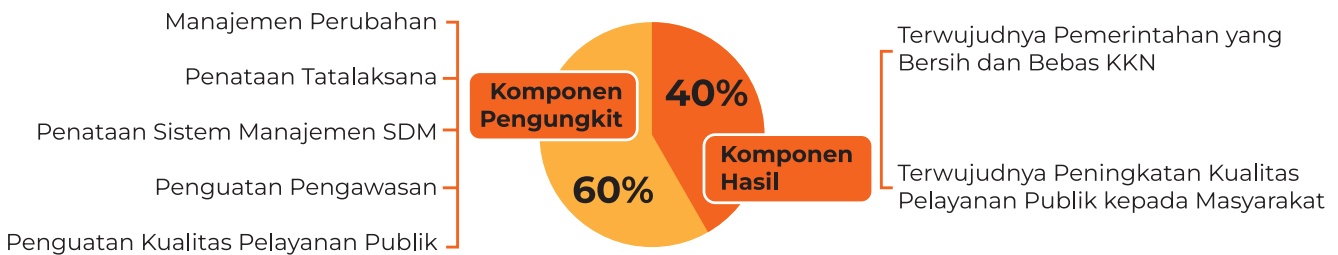


Sedangkan tahun 2021, dengan terdapat perubahan nomenklatur salah satu indikator kinerja, menjadi Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Mendapatkan Predikat ZIWBK/WBBM. Namun, 2 satker yang ditargetkan untuk mendapat predikat ZI-WBK/BBM tidak lolos penilaian oleh Kementerian PANRB.



Tahun 2020—2021 pendampingan yang dilakukan oleh tim Sekretariat Badan Bahasa sebagai koordinator pelaksanaan ZI-WBK di lingkungan BPP Bahasa, melakukan pendampingan dan reviu atas lembar kerja evaluasi WBK berpedoman pada Permenpan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pendampingan yang dilakukan oleh Sekretariat BPP Bahasa, yaitu melalui daring karena pada tahun 2020—2021 pandemi covid masih berlangsung. Pendampingan dilakukan agar satuan kerja yang diusulkan memiliki persiapan yang maksimal baik dari kelengkapan data dukung maupun sarana dan prasarana penunjang dalam penilaian tersebut.



Secara singkat, berikut penyebab ketidaktercapaian tahun 2020—2021.

1. Belum adanya kesepahaman pada satuan kerja yang ditunjuk terkait data dukung lembar kerja evaluasi ZI-WBK.
2. Belum adanya pedoman standar sarana prasarana dan unsur penunjang lainnya sebagai acuan satuan kerja dalam mencapai predikat ZI-WBK/WBBM.

Sedangkan penyebab keberhasilan capaian IKK di tahun 2020—2021, yaitu.

1. Pendampingan dan sosialisasi dari tim ZI Sekretariat Badan Bahasa ke satker yang akan dibina dan diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM.
2. Acuan satker dalam mencapai ZI-WBK/WBBM mengikuti rincian penilaian yang terdapat pada Lembar Kerja Evaluasi dari KemenpanRB.

Berdasarkan Permendikbudristek 13 tahun 2022 tentang Revisi Renstra, nomenklatur IKK di tahun 2022—2024 berubah menjadi Jumlah Satker di Badan Bahasa yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM. Berikut Definisi Operasional, Metode Hitung, dan Rumus Penghitungannya.

Satker adalah unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang terdiri dari: Pusat, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan UPT.

Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK dan WBBM oleh Menpan adalah satker yang memenuhi 6 komponen, diantaranya: manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas layanan publik. Dasar Hukum: PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Metode penghitungan : Jumlah satker yang mendapatkan predikat ZI- WBK/ WBBM adalah jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI- WBK/ WBBM oleh Unit Eselon I.

Tabel 6
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
yang Mendapatkan Predikat ZI-WBK/WBBM Tahun 2022—2024

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar 2020	Satuan	2022			2023		
			Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	5	Satker	5	9	180	5	9	180

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Angka Dasar 2020	Satuan	2024			Target Renstra 2024
			Target	Capaian	%	
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (Satker)	5	Satker	10	12	120	5

Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 90 Tahun 2021 adalah konsep dan program untuk mewujudkan unit kerja pemerintah yang bebas dari korupsi serta memberikan pelayanan publik berkualitas tinggi. Permenpan RB 90/2021 ini menguraikan bagaimana ZI-WBK dilaksanakan sebagai bagian dari reformasi birokrasi untuk meningkatkan integritas dan akuntabilitas dalam instansi pemerintah.

Secara lebih rinci, ZI-WBK berfokus pada *pembangunan Zona Integritas (ZI)*, yang merupakan predikat yang diberikan kepada unit kerja pemerintah yang menunjukkan komitmen dan keberhasilan dalam mewujudkan *Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)*. Tujuannya adalah untuk mengembangkan lingkungan yang meminimalkan risiko korupsi, kolusi, dan nepotisme serta meningkatkan kualitas layanan publik melalui perbaikan tata kelola.

Berikut adalah beberapa komponen utama ZI-WBK sesuai dengan Permenpan RB 90 Tahun 2021:

1. Manajemen Perubahan: Memastikan perubahan pola pikir dan budaya kerja seluruh pegawai agar memiliki integritas dan komitmen tinggi dalam mendukung reformasi birokrasi.
2. Penataan Tata Laksana: Mengoptimalkan tata kelola dan prosedur kerja di setiap unit untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Ini mencakup penggunaan teknologi dan sistem informasi yang mendukung transparansi.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM: Menciptakan manajemen sumber daya manusia yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing, dengan penempatan pegawai berdasarkan kompetensi.
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja: Membangun komitmen pimpinan dalam pengelolaan anggaran dan program agar setiap kegiatan dilaksanakan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan target kinerja.
5. Penguatan Pengawasan: Memperkuat pengawasan internal, penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*), serta tindak lanjut atas keluhan atau aduan masyarakat.

6. Peningkatan Kualitas Layanan Publik: Mengembangkan standar layanan yang responsif, transparan, dan bebas dari pungutan liar, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan yang mudah diakses masyarakat.

Unit kerja yang berhasil membangun ZI-WBK akan mendapatkan predikat WBK sebagai pengakuan atas komitmennya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi serta memberikan layanan berkualitas tinggi kepada masyarakat. Implementasi ZI-WBK ini diharapkan mampu mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik, serta menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan melayani.

Dalam pelaksanaan kegiatan dan program di Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka pengusulan satker calon ZI-WBK/WBBM tidaklah mudah karena satuan kerja yang diusulkan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut

SYARAT	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Min. Pengungkit	40	48
Bobot Nilai Min. per Area Pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen Hasil “Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel”	Min. 18,25	Min 19,50
Nilai Sub-Komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi”	Min. 15,75 (Indeks 3,60)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)
Nilai Sub-Komponen “Kinerja Lebih Baik”	Min. 2,50	Min. 3,75
Nilai Komponen Hasil “Pelayanan Publik yang Prima”	Min. 14,00 (Indeks 3,20)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Sekretariat Badan Bahasa dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM yaitu belum samanya persepsi pegawai pada tiap satker dalam memahami LKE ZI-WBK/WBBM sehingga perlu dilakukan pendampingan secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan tidak ada perbedaan persepsi dengan melibatkan asesor dari Biro Ortala, TPI dan TPN.

Tabel 7
Satker yang diusulkan mendapatkan ZI-WBK-WBBM tahun 2022—2024

No	2022	No	2023	No	2024
1	Pusbin	1	Pusat Pembinaan (WBBM)	1	Pusat Pembinaan
2	Pusbanglin	2	Pusbanglin	2	Pusbanglin
3	Bali	3	Jawa Barat	3	Jawa Barat
4	Jawa Timur	4	Jawa Tengah	4	Jawa Tengah
5	DIY	5	DIY	5	DIY
6	Kalimantan Tengah	6	Kalimantan Tengah	6	Kalimantan Tengah
7	Lampung	7	Lampung	7	Lampung
8	NTB	8	NTB	8	NTB
9	Sulawesi Tenggara	9	Sulawesi Tenggara	9	Sulawesi Tenggara
				10	Papua
				11	Sulawesi Selatan
				12	Jambi

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendorong pembangunan ZI-WBK/WBBM di satker yaitu melakukan sosialisasi dan pendampingan secara berkelanjutan. Pendampingan tersebut dilakukan oleh asesor Badan, Biro Ortala, TPI dan TPN baik secara daring maupun luring dimulai dari tahap pengisian LKE dan seleksi administrasi di Eselon I. Pada tahun 2024 hal tersebut terlaksana dengan efektif dilihat dari meningkatnya capaian dari pada tahun 2023.

Pelaksanaan pembangunan ZI-WBK/WBBM pada tiap satker berjalan dengan baik ditambah adanya Kepmendikbudristek Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. Adapun penyebab keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja yaitu:

1. Komitmen bersama pimpinan dan seluruh pegawai.
Pimpinan harus memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan budaya antikorupsi dan memberikan teladan yang baik. Dukungan penuh dari seluruh pegawai juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas.
2. Perubahan budaya kinerja yang lebih baik.
Membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas adalah kunci untuk menghindari praktik korupsi. Ini juga mendorong pegawai untuk melayani dengan lebih profesional.
3. Inovasi dan penguatan kualitas pelayanan publik.
Unit kerja harus terus berinovasi dalam memberikan layanan yang lebih cepat, mudah, dan bebas dari pungutan liar, sehingga masyarakat merasakan manfaat nyata dari reformasi birokrasi yang dilakukan.

Meskipun ada peningkatan tetapi pada pelaksanaannya tetap ada beberapa hambatan yang dihadapi dan perlu diselesaikan baik oleh asesor di pusat maupun pimpinan dan pegawai di tiap satker. Adapun beberapa hambatan yang ada pada satker diantaranya yaitu:

1. Resistensi terhadap perubahan.
Pegawai yang sudah terbiasa dengan cara kerja lama sering kali enggan beradaptasi dengan sistem dan prosedur baru, terutama jika melibatkan perubahan besar dalam budaya kerja atau proses birokrasi.
2. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas.
Keterbatasan jumlah pegawai atau kurangnya kompetensi dalam unit kerja dapat menjadi kendala besar, terutama dalam menerapkan standar layanan berkualitas serta inovasi berbasis teknologi.
3. Sarana dan prasarana yang kurang memadai.
Tidak semua unit kerja memiliki akses terhadap infrastruktur dan teknologi yang dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Hal ini menjadi hambatan dalam penerapan sistem layanan yang lebih modern dan terintegrasi.

Hambatan yang ada tentunya harus ditanggulangi dan terjadi pada sebagian satker di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, oleh karena itu Sekretariat Badan dalam upaya untuk mencapai target indikator kinerja melakukan beberapa strategi dan antisipasi, yaitu:

1. Pelatihan dan Pendampingan.
Melakukan pelatihan bagi pimpinan dan seluruh pegawai agar mampu menjadi role model dalam integritas dan komitmen antikorupsi.
2. Pengembangan Kompetensi
Pelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas dengan baik.
3. Penggunaan Teknologi Digital
Mengimplementasikan teknologi digital yang hemat biaya untuk meningkatkan efisiensi, seperti *e-office* atau layanan daring.

Berikut penjelasan kinerja setiap layanan yang mendukung keberhasilan ketercapaian indikator kinerja kegiatan.

1. Layanan Hukum Tata Laksana

Dalam mendukung ketercapaian IKK ZI-WBK/WBBM, selama tahun 2024 layanan hukum tata laksana melaksanakan aktivitas seperti penyusunan peraturan perundang-undangan evaluasi organisasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Penyusunan peraturan perundang-undangan diawali dengan mengidentifikasi topik atau isu aturan-aturan yang dibutuhkan oleh organisasi dan masyarakat. Sistematis yang dilaksanakan sebagai langkah awal, yaitu melakukan perencanaan isu atau topik yang telah ditentukan, kemudian pengkajian awal data yang telah dikumpulkan dan dianalisis, sehingga menghasilkan draf awal peraturan. Berikut beberapa produk peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh layanan HTL bersama dengan mitra internal dan eksternal Badan Bahasa.

1. Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Widyabasa.
2. Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dan
3. Permendikbudristek Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.



Evaluasi Organisasi Badan Bahasa

Upaya lain yang dilakukan oleh layanan HTL yaitu evaluasi organisasi yang dilakukan melalui proses penilaian untuk memastikan bahwa organisasi kementerian dapat berjalan secara efektif, efisien, dan adaptif dalam mencapai tujuan pemerintah dan melayani masyarakat. Evaluasi ini merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi dan dilakukan secara

sistematis sesuai panduan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Evaluasi organisasi yang sudah dimulai sejak tahun 2023 ini memiliki tujuan akhir untuk menaikkan eselonisasi Kantor Bahasa menjadi Balai Bahasa dengan penetapan indikator-indikator kinerja utama yang telah diatur dalam Permenpan RB Nomor 2

Tahun 2023, yaitu kesesuaian struktur organisasi, kualitas proses kerja, kinerja sumber daya manusia, dan efektivitas pelaksanaan program serta layanan. Hasil dari evaluasi organisasi ditandai dengan kantor bahasa yang semula berjumlah 13 menjadi 4 kantor bahasa. Sehingga total balai bahasa di lingkungan Badan Bahasa total sebanyak 26 UPT.



Pendampingan PEKPP di Kantor Bahasa NTB

Upaya lainnya yang dilakukan oleh layanan HTL yaitu pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan atau yang disebut dengan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) dengan hasil akhir berupa nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP). Dalam mewujudkan pelayanan publik seperti pelayanan barang, jasa, dan administrasi, Badan Bahasa melaksanakan pendampingan PEKPP pada lima satker, yaitu Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi Bali, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu, dan Kantor Bahasa Provinsi Maluku.

Salah satu tahapan yang dilalui dalam PEKPP Mandiri adalah pembinaan yang merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan kontekstual yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan basis bukti (*evidence bases*). Pendampingan melibatkan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kemendikbudristek bersama dengan penanggungjawab satker dari Sekretariat Badan Bahasa.

Dalam mendukung ketercapaian IKK ZI-WBK/WBBM, layanan HTL melakukan upaya mendorong satker untuk melakukan pembangunan setiap area ZI-WBK/WBBM dengan sosialisasi dan pendampingan, koordinasi dengan mitra internal (TPI) dan eksternal (TPN) terkait mekanisme/sistematika serta kertas kerja format penilaian ZI-WBK/WBBM, dan mendukung pencapaian pelayanan publik yang bersih, efektif, dan berintegritas.

Berikut kendala/hambatan yang dialami oleh layanan HTL dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan ZI-WBK/WBBM, yaitu.

1. Perubahan kebijakan dari tim penilai KemenpanRB terkait proses penilaian ZI-WBK/WBBM.
2. Belum seluruh pegawai di lingkungan Badan Bahasa yang memiliki kesadaran dalam membangun setiap area ZI-WBK/WBBM.

Langkah Antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan, yaitu.

1. Koordinasi dengan tim penilai dari KemenpanRB dan mitra dari Biro Ortala terkait proses penilaian ZI-WBK/WBBM yang terbaru.
2. Melakukan sosialisasi dan pendampingan tentang urgensi pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Berikut informasi linimasa pelaksanaan aktivitas layanan BMN dalam mendukung ketercapaian IKK ZI-WBK/WBBM.



2. Layanan Kerja Sama

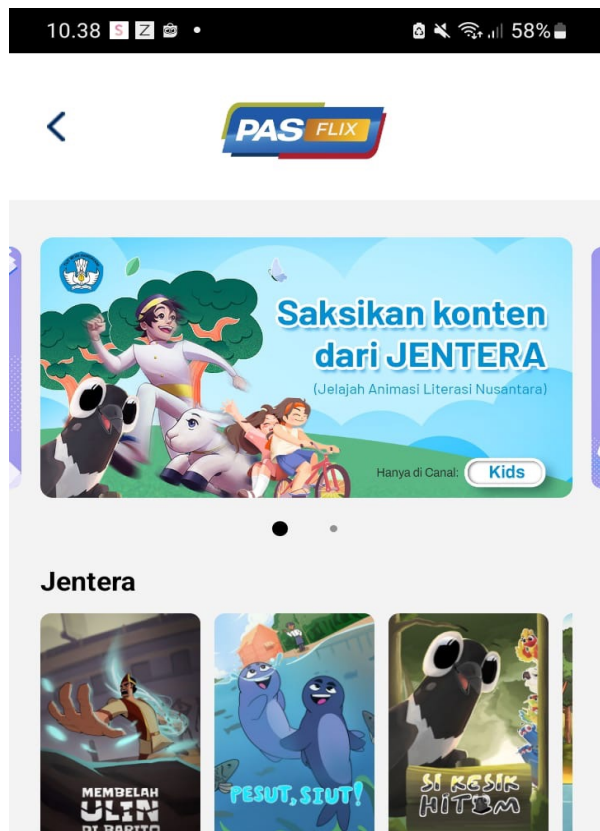
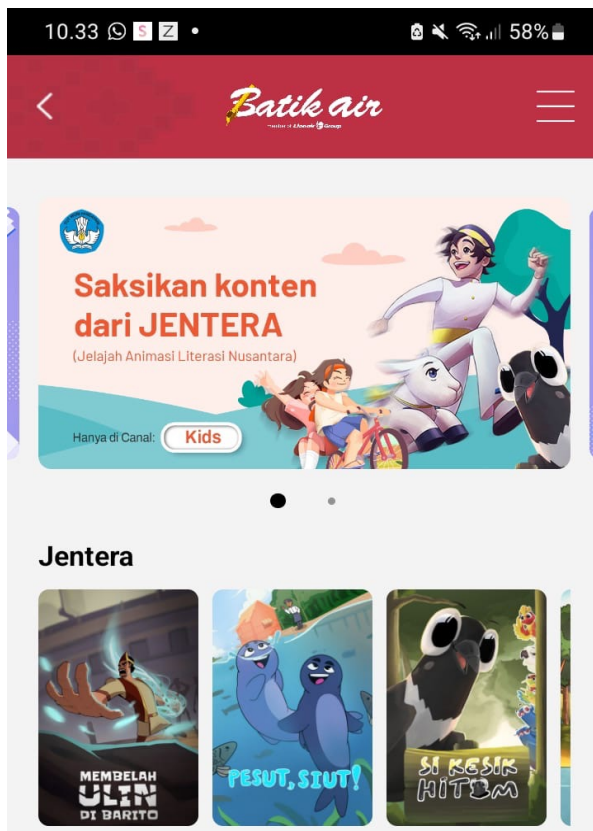
Badan Bahasa dalam melaksanakan kolaborasi dengan mitra strategis dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja satker di lingkungan Badan Bahasa, baik dengan pihak BUMN, swasta, perguruan tinggi, dan asosiasi di dalam dan luar negeri. Indikator keberhasilan dari layanan kerja sama dalam mendukung ketercapaian IKK ZI-WBK/WBBM adalah implementasi hasil perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan mitra yang telah disepakati dan ditandatangani bersama. Dari total 16 sinergitas yang sudah dituangkan dalam perjanjian kerja sama, berikut 12 perjanjian kerja sama yang telah diimplementasikan.

- a. Nota kesepakatan antara Badan Bahasa dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Implementasinya salah satunya adalah Pengimbasan Revitalisasi Bahasa Dayak Sampit di Kabupaten Kotawaringin Timur.
- b. Nota Kesepakatan antara Badan Bahasa dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan yang telah terlaksana adalah penyelenggaraan Festival Bedak Sejuk Duano di Desa Tanjung Solok, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
- c. Nota Kesepakatan antara Badan Bahasa dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sinergi yang telah dilakukan adalah pemprov memfasilitasi kegiatan revitalisasi bahasa Tolaki.
- d. Perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan Badan Informasi Geospasial, ditindaklanjuti dengan kegiatan penelaahan dan pengawasan nama rupabumi
- e. Nota Kesepakatan antara Badan Bahasa dan Pemerintah Kota Bogor. Implementasinya adalah pembinaan 45 lembaga di kota Bogor dalam rangka pemertabatan bahasa negara.



Tindak Lanjut Kerja Sama dengan Pemerintah Kota Bogor

- f. Perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan Perpustakaan Nasional RI. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah pemanfaatan bahan Perpustakaan yang dikelola dan dimiliki Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk dicetak ulang oleh Perpustnas.
- g. Perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan IPDN. Perjanjian ini telah ditindaklanjuti oleh Kantor Bahasa NTB dalam program peningkatan bahasa Inggris dan pembinaan bahasa Indonesia bagi praja.
- h. Perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan Japan *Foundation*. Implementasinya adalah pembekalan Bipa bagi mitra nihongo yang ditugaskan sebagai pengajar bahasa jepang di beberapa provinsi di Indonesia.



- i. Perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan Lynkstream. Lynkstream Pte. Ltd. adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi konten hiburan, seperti film, video pendek, majalah, dan permainan dan merupakan distributor eksklusif untuk PT. Dua Surya Dinamika (DSD), dimana PT. DSD tersebut memiliki dua aplikasi Tripper dan Pasflix. Dua aplikasi ini merupakan aplikasi yang mengkhususkan pada fitur-fitur hiburan di dalam pesawat (*inflight entertainment*).
- j. Perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan TVRI Stasiun Kalimantan Selatan. Implementasi dari perjanjian ini adalah penyiaran program berita berbahasa Banjar melalui siaran Habar Banua.
- k. Perjanjian kerja sama antara Badan Bahasa dan DPRD Kutai Kartanegara. Kegiatan yang telah terlaksana adalah penyusunan Rancangan peraturan daerah bahasa Kutai bersama dengan Balai Bahasa Kalimantan Timur.
- l. nota kesepakatan antara Badan Bahasa dan Pemerintah Kota Surabaya. Implementasinya adalah Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur (Jatim) menggelar sosialisasi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) untuk pemangku kepentingan di Pemerintah Kota Surabaya pada 12 November 2024. Sosialisasi ini diikuti oleh 70 orang dari dinas dan OPD di lingkungan Pemkot Surabaya

4 perjanjian kerja sama yang belum terimplementasi yaitu.

- a. IPSA (Indonesian Professional Speakers Association). Layanan kerja sama sebelumnya telah menjadwalkan akan mengadakan pelatihan public speaking untuk layanan kerja sama dan humas di bulan November. Namun, kegiatan ditangguhkan karena adanya pemotongan anggaran dan direncanakan akan terlaksana pada tahun 2025,
- b. Universitas Kristen Indonesia. Implementasi perjanjian akan dimulai pada tahun 2025 karena perjanjian ini baru saja ditandatangani pada bulan Oktober 2024, dan
- c. Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Implementasi perjanjian akan dimulai pada tahun 2025 karena perjanjian ini baru saja ditandatangani pada bulan Oktober 2024.
- d. Pemerintah Kabupaten Kerinci. Implementasi perjanjian akan dimulai pada tahun 2025 karena perjanjian ini baru saja ditandatangani pada bulan November 2024.

Upaya penandatanganan dan implementasi kerja sama yang baik dapat memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, serta kualitas pelayanan publik yang menjadi fokus utama dalam proses pembangunan ZI-WBK/WBBM.

Kendala/hambatan yang dialami oleh layanan Kerja Sama dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan ZI-WBK/WBBM, yaitu permintaan kerja sama dari perguruan tinggi negeri atau swasta tidak disertai dengan rencana kerja Sehingga langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan, yaitu mengalihkan pengajuan kerja sama dari perguruan tinggi di luar Jakarta ke UPT dan menindaklanjutinya langsung dalam bentuk dokumen pelaksanaan kerja sama (*implementing arrangement*).

Linimasa pelaksanaan aktivitas layanan Kerja Sama dalam mendukung ketercapaian IKK ZI-WBK/WBBM ada di sepanjang tahun dan dilaksanakan selama

adanya permintaan melakukan kerja sama baik di internal Badan Bahasa maupun permintaan dari eksternal Badan Bahasa. Berikut linimasa aktivitas pokok yang dilaksanakan oleh layanan kerja sama di tahun 2024.



3. Layanan Keuangan dan Perbendaharaan

Berdasarkan tugas dan fungsi dari layanan keuangan dan perbendaharaan aktivitas yang dilaksanakan dalam mendukung ketercapaian IKK ZI-WBK/WBBM yaitu pendampingan pengelolaan keuangan satker di lingkungan Badan Bahasa, koordinasi pelaksanaan anggaran dengan pihak eksternal, fasilitasi pelaksanaan serta evaluasi anggaran dan pengelolaan keuangan satuan kerja. Sekretariat Badan Bahasa yang memiliki fungsi membina sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan yang professional untuk mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan yang tepat guna dan berhasil guna melaksanakan pendampingan sekaligus memastikan bahwa pengelolaan keuangan di Badan Bahasa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bebas korupsi, kolusi, efektif dan efisien serta transparan dan akuntabel sesuai dengan Undang-Undang di Bidang Keuangan Negara.



Pendampingan Pengelolaan Keuangan di UPT

Kendala/hambatan yang dialami oleh layanan Keuangan dan Perbendaharaan dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan ZI-WBK/WBBM, yaitu belum semua satker tertib administrasi dalam memenuhi standar pengajuan pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Sehingga langkah Antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan, yaitu melakukan pembinaan ke seluruh satker terkait standar pengajuan pelaksanaan anggaran dan kegiatan.

Berikut informasi linimasa pelaksanaan aktivitas layanan Keuangan dan Perbendaharaan dalam mendukung ketercapaian IKK ZI-WBK/WBBM.



4. Layanan APK



Penyusunan laporan keuangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023 dan 2024

Pelaksanaan proses pelaporan akuntansi dalam mendukung pelaksanaan indikator ZI-WBK/WBBM melalui penyusunan laporan keuangan, bahan SPIP, koordinasi dan penyelesaian tindak lanjut hasil audit, dan pendampingan pelaporan keuangan dan tindak lanjut hasil audit. Upaya-upaya yang dilaksanakan oleh layanan APK menunjang tercapainya sinkronisasi data keuangan dan BMN yang sesuai dengan standar, memberikan solusi terhadap permasalahan penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan seluruh satker dapat disampaikan tepat waktu.



Penyusunan laporan keuangan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa TA 2023 Unaudited

Dalam rangka mendukung pembinaan penyelenggaraan SPIP pada Kementerian/ Lembaga, layanan APK melaksanakan penyiapan bahan penilaian atas maturitas

SPIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa baik untuk komponen penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan.



Penyusunan bahan SPIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas Tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021).

Pada tahun 2023 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah memperoleh nilai maturitas penyelenggaraan SPIP 3,408. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai salah satu unit Eselon I di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut berperan dalam upaya memperoleh nilai maturitas tersebut. Sedangkan hasil evaluasi pada tahun 2024 masih pada tahap Penjaminan Kualitas oleh Inspektorat Jenderal.

Kegiatan lainnya yang turut mendukung ketercapaian indikator kinerja ZI-WBK/WBBM adalah terkait hasil pelaporan keuangan dan pengendalian internal atas pelaporan keuangan (PIPK). Upaya ini dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas penyusunan pelaporan keuangan berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Strategi yang dilakukan oleh layanan APK adalah melakukan pendampingan ke seluruh satker terkait pelaporan keuangan dan pemantauan tindak lanjut hasil. Berikut pendampingan ke satker di lingkungan Badan Bahasa di tahun 2024.

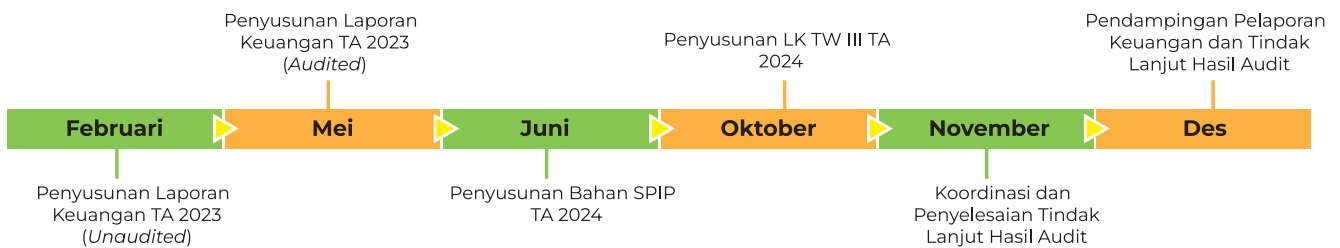


Disamping melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan, layanan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa didampingi oleh tim BPK RI dan Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berhasil melakukan tindak lanjut temuan BPK RI dan Inspektorat Jenderal dengan rincian sebagai berikut.

No	Tahun LK		Uraian	Jumlah Temuan	Tindak Lanjut	Saldo Temuan
1	2013	LK	Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Tidak Tertib.	783.660.000	731.126.000	52.534.000
2	2014	LK	Kelebihan Pembayaran Pekerjaan atas Kegiatan Belanja Modal pembangunan Gedung Badan Bahasa	347.000.000.000	346.899.111.001	100.888.999
3	2015	LK	Penerimaan kas sebesar Rp17,92 Miliar belum dilaporkan dan/atau digunakan langsung / K-1.1.4	1.848.336.091	1.848.336.091	-
3	2016	LK	Terdapat Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan. Pada Balai Bahasa Sumatera Barat dan Balai Bahasa Riau	110.994.500	5.760.000	105.234.500
4	2020	LK	Belanja modal Kemendikbudristek tidak sesuai ketentuan pada Balai Bahasa Sumatera Barat	378.615.370	378.615.370	-
5	2021	LK	Pengelolaan Keuangan pada Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara Tidak tertib	569.736.753	569.736.753	-
6	2022	LK	Kekurangan penyeteroran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum sesuai ketentuan.	2.511.000	2.511.000	-
7	2023	LK	Penyelesaian Gedung KB Gorontalo tidak sesuai ketentuan dan jaminan pelaksanaan Rp1.065.063.250,00 tidak diakui oleh Bank Penerbit	1.065.063.250	-	1.065.063.250

No.	Satuan Kerja	Temuan		Tindak Lanjut Sesuai			Tindak Lanjut Belum Sesuai		
		Jumlah kejadian	Nominal	Jumlah kejadian	Nominal	%	Jumlah	Nominal	%
1	Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat	5	63.978.120	0	63.978.120	100,00	0	-	0,00
2	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Barat	10	36.892.747	3	36.892.799	100,00	7	52	0,00
3	Kantor Bahasa Provinsi NTB	4	37.532.000	4	37.532.000	100,00	0	-	0,00
4	Kantor Bahasa Provinsi Lampung	6	122.580.000	6	122.580.000	100,00	0	-	0,00
5	Kantor Bahasa Provinsi Kaltim	4	5.550.000	0	5.550.000	100,00	3	-	0,0
6	Kantor Bahasa Provinsi Jambi	7	10.024.753	7	10.024.753	100,00	0	-	0,0
7	Balai Bahasa Provinsi Bali	8	9.303.153	8	9.303.153	100,00	0	-	0,0
8	Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo	6	6.389.450	6	6.389.450	100,00	0	-	0,0
9	Kantor Bahasa Provinsi Maluku	4	25.323.085	4	25.323.085	100,00	0	-	0,0
10	Kantor Bahasa Provinsi Babel	6	42.155.000	6	42.155.000	100,00	0	-	0,0
11	Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu	5	7.617.600	0	7.617.600	100,00	0	-	0,0
12	Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah	4	-	2	-	0,00	2	-	0,0
13	Kantor Bahasa Provinsi Banten	8	4.045.000	6	4.045.000	100,00	2	-	0,0
14	Balai Bahasa Provinsi Kalbar	5	17.826.129	4	17.826.129	100,00	1	-	0,0
15	Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara	5	11.634.000	0	11.634.000	100,00	5	-	0,0
16	Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara	4	763.500	0	763.500	100,00	1	-	0,0
17	Balai Bahasa Provinsi D.I. Yogyakarta	4	18.180.250	1	18.180.250	100,00	1	-	0,0
18	Kantor Bahasa Provinsi Kep. Riau	3	10.590.000	0	10.590.000	100,00	0	-	0,0
19	Balai Bahasa Kalimantan Selatan	2	4.691.987,87	2	4.691.987,87	100,00	0	-	0,0
20	Balai Bahasa Kalimantan Tengah	5	7.128.000,00		7.128.000	100,00	5	-	0,0
21	Kantor Bahasa Provinsi NTT	2	1.260.000		1.260.000	100,00	1	-	0,0
22	Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara	3	3.221.200,00	3	3.221.200,00	100,00	0	-	0,0
23	Balai Bahasa Provinsi Sumsel	4	1.800.000		1.800.000	100,00	3	-	0,0
24	Balai Bahasa Provinsi Aceh	5	6.034.762	5	6.034.762	100,00	0	-	0,0
25	Balai Bahasa Provinsi Papua	4	3.850.000	4	3.850.000	100,00	0	-	0,0
26	Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur	6	108.735.000	6	108.735.000	100,00	0	-	0,0
27	Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara	4	20.962.500	4	20.962.500	100,00	0	-	0,0
28	Balai Bahasa Sulawesi Selatan	5	3.380.000		2834500	83,86	5	545.500	16,1
29	Balai Bahasa Sulawesi Tengah	6	8.550.000		8.550.000	100,00	5	-	0,0
30	Balai Bahasa Riau	6	11.900.000		11.900.000	100,00	6	-	0,0
Jumlah		150	611.898.237	81	611.352.789	99,91	47	545.448	0,09

Berikut informasi linimasa pelaksanaan aktivitas layanan Analisis Pelaporan Keuangan dalam mendukung ketercapaian IKK ZI-WBK/WBBM.



Berikut kendala/hambatan yang dialami oleh layanan APK dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan ZI-WBK/WBBM, yaitu.

1. Tindaklanjut hasil temuan itjen/BPK dengan nilai dibawah 100% dapat menghambat pengusulan satker ZI-WBK/WBBM pada tahap administrasi.
2. Belum optimalnya pengawasan dari unit pengendalian gratifikasi dan sistem pengendali internal dalam meminimalisir tindakan KKN.

Langkah Antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan, yaitu.

1. Meningkatkan fungsi pendampingan ke satker terkait dengan pelaporan keuangan.
2. Melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada unit pengendalian gratifikasi dan sistem pengendali internal terkait tugas dan fungsi pengawasan

5. Layanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan

Dukungan layanan kerumahtanggaan dan perlengkapan terkait ketercapaian indikator ZI-WBK/WBBM mencakup pengelolaan fasilitas, peralatan, dan sarana lainnya yang mendukung operasional instansi pemerintah. Meskipun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan publik dalam arti umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan yang dikelola dengan baik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung efisiensi kerja, mempercepat birokrasi, serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. Pemenuhan sarana dan prasarana serta fasilitas kerja yang memadai mendukung efektivitas dan produktivitas serta kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dalam pencapaian ZI-WBK/WBBM.



Penyediaan sarana, prasarana, dan fasilitas kantor turut mendukung kelancaran serta peningkatan pelayanan publik sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat.

Peran layanan kerumahtanggaan dan perlengkapan dalam ZI-WBK dan WBBM sangat strategis dalam menciptakan lingkungan kerja yang efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan pengelolaan fasilitas dan perlengkapan yang baik, instansi pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengurangi potensi penyalahgunaan, serta memastikan bahwa pegawai bekerja dalam lingkungan yang kondusif dan produktif. Semua ini berkontribusi pada tercapainya tujuan untuk menciptakan birokrasi yang bersih, melayani, dan mampu memenuhi harapan masyarakat.

Informasi linimasa pelaksanaan aktivitas layanan kerumahtanggaan dan perlengkapan dalam mendukung ketercapaian IKK ZI-WBK/WBBM dilakukan setiap bulan.

Kendala/hambatan yang dialami oleh layanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan ZI-WBK/WBBM, yaitu pemeliharaan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik kepada masyarakat belum maksimal. Sehingga langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan, yaitu mengoptimalkan pengalihan anggaran untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik.

Layanan kerumahtanggaan dan perlengkapan dilaksanakan sepanjang tahun baik dalam melayani pegawai di lingkungan Sekretariat BPP Bahasa, mitra internal, maupun eksternal dari lembaga lain di luar BPP Bahasa maupun Kemendikbudristek.

6. Layanan Perpustakaan

Aktivitas yang dilaksanakan oleh layanan perpustakaan seperti bedah buku, pameran buku kebahasaan dan kesastraan, dan studi banding antar perpustakaan, menjadi salah satu faktor pendukung upaya peningkatan pelayanan publik ketercapaian indikator ZI-WBK/WBBM. Perpustakaan di Badan Bahasa merupakan perpustakaan khusus tentang kebahasaan dan kesastraan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain. Perpustakaan Badan Bahasa melayani pemustaka yang terdiri dari pegawai, peneliti, dosen, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum. Koleksi cetak yang tersedia di perpustakaan berupa buku terbitan Badan Bahasa, Balai, dan Kantor Bahasa hasil penelitian/penyusunan buku tentang teori, kamus, glosarium, antologi, majalah, jurnal ilmiah, dan klipring kebahasaan dan kesastraan. Selain itu, di perpustakaan juga tersedia buku-buku tentang pengetahuan umum, pengajaran, dan bidang keagamaan, cerpen, novel, dan sastra anak yang jumlahnya sudah mencapai ribuan judul, serta ada juga koleksi digital yang berupa terbitan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. Adapun jumlah koleksi cetak berjumlah 36.663 judul, 49.455 eksemplar.



Seminar dan Pameran Perpustakaan Badan Bahasa



Aktivitas Bedah Buku di Lingkungan Badan Bahasa

Kegiatan Bedah Buku dalam meningkatkan layanan publik ke masyarakat memiliki tujuan, selain melakukan diskusi dan pembahasan tentang buku yang menjadi tema Bedah Buku, juga untuk menarik minat pengunjung perpustakaan agar dapat langsung memanfaatkan layanan di perpustakaan.

Kendala/hambatan yang dialami oleh layanan Perpustakaan dalam mendukung ketercapaian indikator kinerja kegiatan ZI-WBK/WBBM, yaitu belum seluruh satker mengoptimalkan layanan perpustakaan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik. Sehingga langkah antisipasi yang dilakukan untuk mengatasi kendala/hambatan, yaitu melakukan pemantauan ke satker terkait dengan standar layanan perpustakaan.

IKK 3

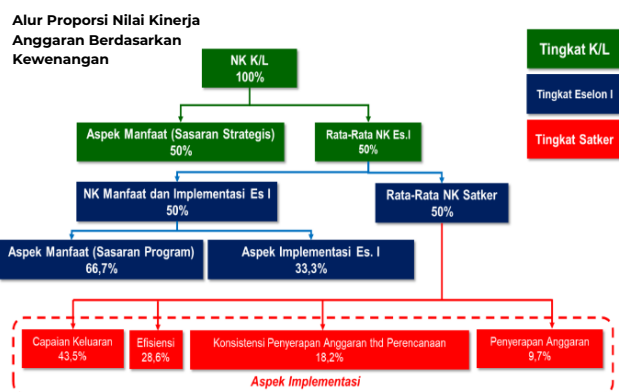
Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91

SK	IKK	2020			2021			Target 2024
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 91	91	93	102,20	92	92,22	100,24	95

Indikator kinerja kegiatan Rata-Rata NKA atas Pelaksanaan RJAK/L Satker Minimal 91 menjadi target Renstra sebelum revisi di tahun 2020 sampai dengan 2021. Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/ Lembaga. Pelaksanaan program dan anggaran Kementerian/ Lembaga yang telah selesai dihitung hingga diperoleh nilai kinerja anggaran setiap satker. Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas tiga aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 241 tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan dalam melaksanakan evaluasi kinerja anggaran yang berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 195 tahun 2008 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

IKPA Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%. Bobot masing-masing variabel pada aspek implementasi, terdiri atas capaian keluaran, efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dan penyerapan anggaran.



Capaian Rata-Rata NKA satker di tahun 2020 minimal 91 dari target 91 tercapai nilai 93 atau sebesar 102%, dan di tahun 2021 dari target 92 tercapai 92,22 atau sebesar 100,24%. BPP Bahasa di tahun 2020. Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Satker diperoleh dari hitungan dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian kinerja anggaran setiap variabel dengan bobot yang berbeda-beda, kemudian nilai setiap variabel tersebut dirata-ratakan untuk menghasilkan total nilai kinerja.

Tabel 8
NKA satker di lingkungan Badan Bahasa Tahun 2020—2021

NO	SATUAN KERJA	2020	2021
1	SEKRETARIAT BADAN BAHASA	72,35	80,48
2	PUSAT PENGEMBANGAN DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA	83,48	86,77
3	PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA	69,13	73,68
4	PUSAT PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN BAHASA	-	0,00
5	BALAI BAHASA ACEH	69,31	71,97
6	BALAI BAHASA BALI	80,76	87,27
7	BALAI BAHASA D.I. YOGYAKARTA	80,15	82,91
8	BALAI BAHASA JAWA BARAT	80,76	82,85
9	BALAI BAHASA JAWA TENGAH	78,47	86,15
10	BALAI BAHASA JAWA TIMUR	64,67	72,33
11	BALAI BAHASA KALIMANTAN BARAT	69,04	71,98
12	BALAI BAHASA KALIMANTAN SELATAN	62,14	63,84
13	BALAI BAHASA KALIMANTAN TENGAH	74,00	89,53
14	BALAI BAHASA PAPUA	44,63	66,44
15	BALAI BAHASA RIAU	77,78	80,42
16	BALAI BAHASA SULAWESI SELATAN	74,14	76,85
17	BALAI BAHASA SULAWESI TENGAH	71,19	74,84
18	BALAI BAHASA SULAWESI UTARA	73,57	79,65
19	BALAI BAHASA SUMATERA BARAT	69,72	72,77
20	BALAI BAHASA SUMATERA SELATAN	80,31	80,83
21	BALAI BAHASA SUMATERA UTARA	73,57	74,41
22	KANTOR BAHASA BANTEN	78,61	83,25
23	KANTOR BAHASA BENGKULU	72,68	75,17
24	KANTOR BAHASA GORONTALO	78,70	82,98
25	KANTOR BAHASA JAMBI	75,95	77,93
26	KANTOR BAHASA KALIMANTAN TIMUR	69,20	72,91
27	KANTOR BAHASA KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	68,58	74,57
28	KANTOR BAHASA KEPULAUAN RIAU	70,94	76,32
29	KANTOR BAHASA LAMPUNG	80,16	81,60
30	KANTOR BAHASA MALUKU	72,76	75,58
31	KANTOR BAHASA MALUKU UTARA	76,29	80,74
32	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT	71,72	72,19
33	KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA TIMUR	67,92	75,92
34	KANTOR BAHASA SULAWESI TENGGARA	81,90	82,53

Kategori NKA	
Sangat Baik	> 90%
Baik	>80% -- 90%
Cukup	>60% -- 80%
Kurang	>50% -- 60%
Sangat Kurang	s.d. 50%

Berdasarkan data tersebut di atas NKA seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa merupakan agregat ketercapaian nilai kinerja anggaran Badan Bahasa melebihi dari target pada Perjanjian Kinerja (PK). Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,22% dari tahun 2020. Dari hasil data dan informasi capaian NKA tahun 2020—2021, masih terdapat satuan kerja yang tidak mencapai target kinerjanya. Secara umum penyebab

kegagalan mencapai target NKA disebabkan oleh rendahnya nilai konsistensi RPD dan nilai efisiensi pada komponen pendukung dalam penilaian EKA. Begitu juga pada komponen penilaian IKPA, halaman III DIPA, dan Pengelolaan UP. Namun satker telah melakukan langkah antisipasi sehingga dalam pencapaian target kinerja dapat diatasi dengan melakukan peningkatan koordinasi internal antara pengelola keuangan dan perencanaan, peningkatan dalam pengelolaan keuangan, dan peningkatan kostistensi pelaksanaan kegiatan.



Pendampingan Penyusunan Laporan Kinerja Satker

Upaya ini merupakan penyebab keberhasilan ketercapaian target rata-rata nilai kinerja anggaran satker atas pelaksanaan RKA-K/L minimal 91 di tahun 2020—2021. Sejalan dengan upaya tersebut, pendampingan dari tim Sekretariat Badan Bahasa juga dilakukan ke seluruh satker untuk dapat mengoptimalkan nilai evaluasi kinerja dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran.

Kendala/hambatan yang dialami dalam mencapai target NKA Minimal 91 di tahun 2020—2021, yaitu.

1. Pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa satker kurang maksimal dalam pencapaian output.
2. Satker belum konsisten melakukan penarikan dana sesuai dengan rencana dan jadwal pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan setiap triwulan saat revisi halaman lembar III DIPA.

Langkah antisipasi yang dilaksanakan untuk mengatasi kendala/hambatan, yaitu.

1. Menjadwal kembali pelaksanaan kegiatan, mengubah metode pelaksanaan kegiatan, serta melakukan revisi RKA-K/L untuk mengoptimalkan percepatan penyerapan anggaran.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak eksternal terkait, serta melakukan pendampingan ke seluruh satker nilai EKA dan IKPA dapat tercapai optimal.

B. Realisasi Agenda Prioritas

1. Kerja Sama Skala Internasional : Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim)



Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia (Mabbim) Brunei Darussalam menggelar Musyawarah Sekretariat Pertama, Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim) yang dihadiri oleh Sekretaris dan anggota perwakilan Mabbim dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Musyawarah Sekretariat Pertama ini dipimpin oleh Sekretaris Mabbim Brunei Darussalam selaku tuan rumah. Agenda dalam Sidang Eksekutif Pertama Mabbim, yaitu.

- a. Mengkaji Keputusan Umum Sidang Eksekutif ke-59 Mabbim, 2023
- b. Mengkaji Tata Kerja Mabbim baru yang disempurnakan oleh Malaysia.
- c. Mengkaji dan mendiskusikan pemutakhiran Panduan Penyelenggaraan Forum Ketua Mabbim yang disempurnakan oleh Brunei Darussalam.
- d. Mendiskusikan dan mendaftar usulan program Mabbim baru dan lini masanya.
- e. Mendiskusikan pelaksanaan rangkaian kegiatan-kegiatan Mabbim untuk Forum Ketua Mabbim, Seminar Kebahasaan Mabbim, dan Syarahan Mabbim.
- f. Mendiskusikan isu-isu lain yang berkaitan dengan Mabbim.



Kegiatan Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia di Negara Brunei Darussalam

Indikator keberhasilan aktivitas prioritas Mabbim yaitu menghasilkan program-program terkait dengan isu kebahasaan yang dapat merespon dengan cepat perkembangan zaman di bidang kebahasaan. Agenda pertemuan ini turut memperkuat dan memajukan bahasa sebagai pemersatu ketiga negara tersebut dalam bidang budaya, pendidikan, dan komunikasi.

2. Kerja Sama Skala Internasional : Majelis Sastra Asia Tenggara (Mastera)



Kegiatan Majelis Sastra Asia Tenggara di Jakarta

Sekretariat Badan Bahasa memberikan kesempatan kepada para sastrawan muda dari empat negara anggota yang hadir yakni Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam untuk memperluas wawasan dan kemampuan teknis penulisan melalui Program Penulisan Mastera Tahun 2024 dengan tema Novel. Selain itu, di tahun 2024 ini, Mastera Brunei Darussalam selaku tuan rumah menyelenggarakan Sidang Ke-28 Mastera di Brunei Darussalam. Tujuan Sidang Ke-28 Mastera adalah sebagai berikut.

- a. Mengikuti kegiatan Seminar Kesusastraan Asia Tenggara (SAKAT)
- b. Penerimaan Anugerah Sastra ke-7 Mastera dari Brunei Darussalam
- c. Mengikuti Festival Teater Mastera (Apresiasi Naskah Drama)
- d. Mendiskusikan isu-isu lain yang berkaitan dengan Mastera
- e. Mempererat hubungan dan kerja sama kesastraan negara anggota
- f. Memajukan sastra Indonesia/Melayu sebagai sastra ASEAN
- g. Mewujudkan sastra Indonesia/Melayu sebagai warga sastra dunia,

Memantapkan penggunaan bahasa Indonesia/Melayu sebagai media pengungkap ilmu pengetahuan dan seni ke peringkat rantau (regional) dan antarbangsa (internasional)

Indikator keberhasilan aktivitas Mastera ini sendiri adalah untuk memajukan sastra Asia Tenggara melalui kerjasama antar negara, pengembangan karya sastra, serta upaya memperkenalkan budaya dan identitas kawasan tersebut ke dunia internasional.

3. Kerja Sama Skala Nasional



BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

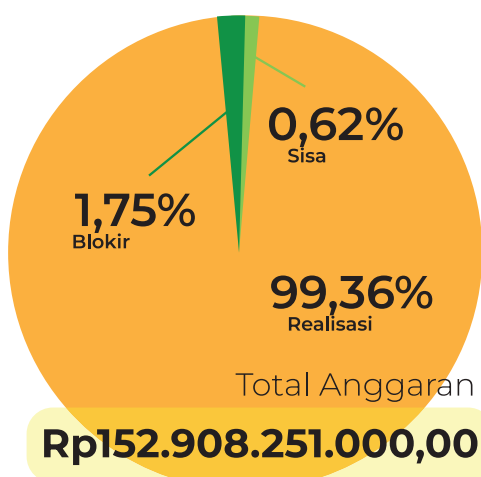
PETA CAPAIAN KERJA SAMA 2022-2024



Fasilitasi kerja sama antarlembaga ini merupakan basis data dokumen koordinasi dan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan yang dilakukan oleh Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Fasilitasi ini ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi para pemangku kepentingan yang ingin melaksanakan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Tahun 2022—2024 ini, Sekretariat Badan telah melaksanakan fasilitasi kerja sama dengan 72 Perguruan tinggi, lembaga, serta Pemerintah daerah. Dengan kerja sama ini, diharapkan semakin banyak mitra yang melaksanakan tugas pengembangan, perlindungan, dan pembinaan bahasa dan sastra.

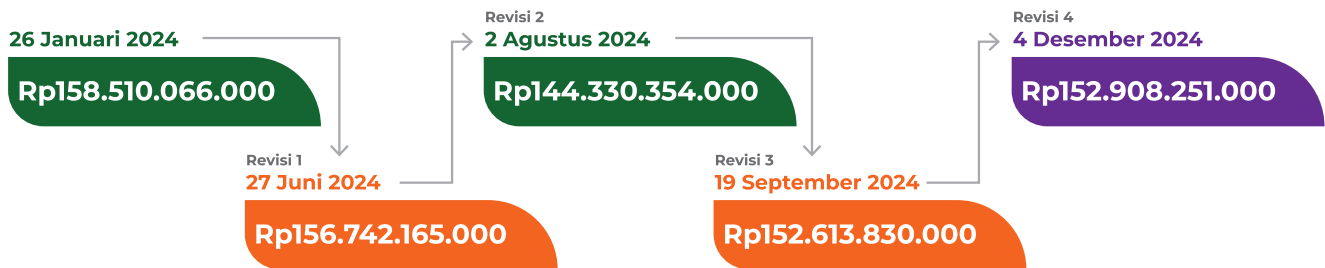
C. Realisasi Anggaran

1. Capaian Anggaran



Pagu anggaran Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam DIPA tahun 2024 sebesar Rp152.908.251.000,00 dengan blokir anggaran sebesar Rp2.688.652.000,00, sehingga total pagu aktif sebesar Rp150.062.719.000,00. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp149.104.009.473,00 dengan persentase daya serap sebesar 97,15% (dengan blokir) atau 99,36% (tanpa blokir).

Berikut perkembangan pagu anggaran Sekretariat Badan Bahasa di tahun 2024.



Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai program Dukungan Manajemen (kode WA) untuk pencapaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan 2 indikator kinerja kegiatan, yaitu Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB dan Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran		Pagu Aktif	Realisasi	
	Pagu	Blokir		Anggaran	%
Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	35.694.479.000	2.688.652.000	32.848.947.000	32.672.696.352	99,46
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	117.213.772.000	0	117.213.772.000	116.431.313.121	99,33
TOTAL	152.908.251.000	152.908.251.000	150.062.719.000	149.104.009.473	99,36

2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2024 Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 5,42% dari total penyesuaian anggaran sampai dengan penghujung tahun 2024 sebesar Rp5.601.815.00,00 dan blokir anggaran sebesar Rp2.688.652.00,00 disandingkan dengan total pagu anggaran. Ketercapaian 2 IKK yang sangat optimal di akhir tahun dapat dilihat dari rata-rata capaian IKK sebesar 115,55%,. Efisiensi anggaran per indikator terlihat dalam tabel sebagai berikut.

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK			Anggaran		
	Target	Capaian	%	Semula	Pagu	Blokir
Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	97	100	103,09	32.073.755.000	35.694.479.000	2.688.652.000
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM (Satker)	10	12	120	126.436.311.000	117.213.772.000	0

Efisiensi ► **5,42%****Rp8.290.467.000,00**

Berdasarkan informasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113 tahun 2023 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun 2024, hasil efisiensi Sekretariat Badan Bahasa juga diperoleh dari hasil implementasi dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran SBKU layanan Barang Milik Negara dengan nilai sebesar 14. Berikut ringkasan penjelasan efisiensi di Sekretariat Badan Bahasa.

1. Realisasi anggaran dan optimalisasi capaian fisik RO SBKU Layanan BMN.
2. Penyesuaian anggaran sampai dengan akhir tahun 2024.
3. Blokir anggaran di lingkungan Sekretariat Badan Bahasa.

D. Kinerja Lain-Lain

a. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Sasaran reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020--2024 dan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020—2024, yaitu terciptanya birokrasi di Kemendikbudristek yang bersih dan akuntabel serta terciptanya birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan pada BPP Bahasa melalui Sekretariat BPP Bahasa merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi birokrasi berfokus pada perbaikan layanan publik melalui digitalisasi dan penyederhanaan proses layanan.



Berdasarkan PermenpanRB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan Kepmendikbud Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat Badan Bahasa melakukan pendampingan pada tiap satuan kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Berikut tahapan pengusulan satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi BPP Bahasa.

Total	7 satker di lingkungan BPP Bahasa yang sudah mendapatkan predikat ZI-WBK
2024	1. BBP Jawa Tengah, 2. BBP DIY Yogyakarta, 3. KBP NTB
2022	1. BBP Jawa Timur 2. BBP Bali
2020	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Berikut satker di lingkungan BPP Bahasa yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM sebagai salah satu dampak upaya implementasi Reformasi Birokrasi selama periode Renstra 2020—2024.

Melalui upaya ini, diharapkan agar birokrasi lebih efisien, berintegritas, dan mampu mendukung program-program pendidikan yang berdampak luas bagi masyarakat.

b. Informasi Capaian Kinerja Lainnya

ii. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP)

PEKPP menghasilkan nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) merupakan suatu upaya pengukuran sistematis pada unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh bahan penyusunan rekomendasi dalam perbaikan pelayanan. Standar Kualitas Layanan Publik suatu instansi menjadi tanggungjawab setiap satker yang menyelenggarakan layanan sehingga memerlukan strategi khusus yaitu melakukan evaluasi mandiri. Hal ini bertujuan untuk memperluas pelaksanaan PEKPP pada keseluruhan ruang lingkup pelayanan publik yang meliputi pelayanan barang, jasa, dan administratif. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2023, hasil IPP menjadi salah satu komponen pengukuran (indikator) dalam rangka penataan Unit Pelaksana Teknis. Disebutkan bahwa IPP yang perlu dicapai adalah dengan kategori minimal A- (A minus). Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merupakan salah satu unit kerja yang mempunyai komitmen yang sangat kuat dalam mewujudkan layanan prima kepada Masyarakat. Dalam mewujudkan PEKPP tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa akan melakukan pendampingan PEKPP pada lima satuan kerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yaitu Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Balai Bahasa Provinsi Bali, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu, dan Kantor Bahasa Provinsi Maluku. Salah satu tahapan dalam PEKPP Mandiri ini adalah tahap pembinaan. Pembinaan merupakan proses peningkatan kualitas melalui serangkaian kegiatan dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan. Proses Pembinaan dilakukan dengan berbasiskan bukti (*evidence based*) dan melalui

pendampingan secara kontekstual. Kolaborasi pembinaan ini dilakukan dengan melibatkan unit yang menangani organisasi dan/atau pelayanan publik, dalam hal ini Biro Organisasi dan Tata Laksana bersama dengan penanggung jawab pada satuan kerja masing-masing, dalam hal ini diwakili oleh Sekretariat Badan.

Pelaksanaan PEKPPP dapat dilakukan secara langsung di lokasi ULE maupun secara daring. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan PEKPPP sebagai berikut:

1. Menginformasikan jadwal PEKPPP kepada ULE dan Evaluator.
2. Menjelaskan maksud dan tujuan penilaian kepada ULE dan/atau pihak terkait dalam bentuk pertemuan pendahuluan yang dihadiri oleh para pihak tersebut di atas dan Unit Kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan pelayanan publik pada lokus tersebut.
3. Melaksanakan PEKPPP sesuai dengan metode yang ditetapkan oleh Penyelenggara PEKPPP.
4. Menyusun dan menyampaikan berita acara hasil PEKPPP yang ditandatangani oleh Evaluator, perwakilan ULE, dan perwakilan Penanggung jawab.
5. Mengolah dan melakukan analisis data hasil PEKPPP yang telah dihimpun oleh evaluator, sehingga diperoleh nilai Indeks Pelayanan Publik.
6. Memberikan penilaian Indeks Pelayanan Publik dan Kategori sesuai dengan yang telah ditentukan.

Evaluasi organisasi pada kementerian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian adalah proses penilaian yang bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi kementerian dapat berjalan secara efektif, efisien, dan adaptif dalam mencapai tujuan pemerintah dan melayani masyarakat. Evaluasi ini merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi dan dilakukan secara sistematis sesuai panduan yang ditetapkan dalam peraturan tersebut.



Proses evaluasi organisasi yang dilakukan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa bertujuan untuk menaikkan eselonisasi kantor bahasa menjadi balai bahasa, dimulai dengan penetapan indikator-indikator kinerja utama yang telah diatur dalam Permenpan RB No. 2 Tahun 2023. Indikator ini dirancang untuk mengevaluasi empat aspek utama: kesesuaian struktur organisasi, kualitas

proses kerja, kinerja sumber daya manusia, dan efektivitas pelaksanaan program serta layanan. Dalam penentuan indikator, diharapkan mengacu pada pencapaian target nasional serta prioritas pembangunan yang berlaku.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data dan analisis kinerja organisasi. Dalam proses ini, pengumpulan data terkait performa organisasi, seperti efektivitas

struktur dan prosedur, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta capaian indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Data ini mencakup hasil evaluasi atas struktur organisasi, pemetaan jabatan, serta pelaksanaan fungsi dan peran yang ada. Melalui analisis ini, organisasi dapat memahami secara mendalam potensi kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam struktur organisasinya.

Setelah melalui proses yang cukup lama dengan melibatkan Biro Ortala dan KemenpanRB, dari kantor bahasa yang semula berjumlah 13 berkurang menjadi 4 kantor bahasa. Hal tersebut merupakan suatu capaian yang signifikan, walaupun belum berhasil menaikkan seluruh kantor bahasa. Untuk selanjutnya akan dilakukan kembali evaluasi organisasi setahun setelah ditetapkannya Permendikburistek tentang kriteria dan klasifikasi UPT di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

iii. Indeks Pembangunan Kebahasaan (IPBas)

Inisiasi penyusunan IPBas merupakan instrumen dan basis formulasi kebijakan bidang Kebahasaan dan kesastraan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia serta daerah. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebahasaan dan kesastraan tingkat nasional dan provinsi. IPBas merupakan indikator komposit yang terdiri atas berbagai dimensi yang dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif terhadap pembangunan bidang kebahasaan dan Kesastraan.

Dengan adanya Indeks Pembangunan Kebahasaan, pembuat kebijakan di tingkat nasional dan daerah akan memiliki instrumen evaluasi yang lebih akurat untuk menilai efektivitas kebijakan kebahasaan yang telah dilaksanakan. Indeks ini juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan baru yang lebih strategis dan berbasis data guna meningkatkan kualitas kebahasaan di Indonesia. Selain itu, indeks ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran bahasa sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Indeks ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pembinaan, perlindungan, dan pengembangan bahasa, serta memberikan panduan praktis bagi pembuat kebijakan untuk merancang intervensi yang tepat. Dengan demikian, indeks ini tidak hanya berperan sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai pendorong kebijakan yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis bukti ilmiah.

Lebih lanjut, Indeks Pembangunan Kebahasaan ini juga dapat berpotensi menjadi model bagi negara-negara multibahasa lainnya dalam melestarikan dan mengembangkan bahasa nasional serta bahasa daerah mereka. Kesadaran global tentang pentingnya pelestarian bahasa makin meningkat, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan yang diusung oleh SDGs. Oleh karena itu, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam wacana kebahasaan global serta menjadi contoh bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam pembangunan kebahasaan.

Urgensi penyusunan IPBas sendiri muncul karena di Indonesia belum ada alat ukur untuk pembangunan di bidang kebahasaan. Tujuan penyusunan IPBas, yaitu.

1. Menjadi indikator keberhasilan pembangunan di bidang kebahasaan dan kesastraan.
2. Menjadi penentu peringkat atau level pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan, baik di tingkat lokal maupun nasional.
3. Menjadi alat ukur strategis dalam mengukur capaian kinerja pemerintah di bidang kebahasaan dan kesastraan.
4. Menjadi dasar perumusan rancangan kebijakan pembangunan kebahasaan dan kesastraan.
5. Menjadi rujukan dan referensi dalam koordinasi lintas sektor K/L dan pemerintah daerah dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan.
6. Menjadi pemicu dan pemacu K/L dan pemerintah daerah berpartisipasi aktif dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan.



Indeks Pembangunan bidang Kebahasaan memiliki 3 dimensi, yaitu Pengembangan, Pelindungan, dan Pembinaan.

Dalam konteks ini, penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan menjadi instrumen penting untuk mengukur sejauh mana upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah telah mencapai tujuannya. Indeks ini akan berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memantau dan mengukur pencapaian kebijakan kebahasaan di tingkat nasional maupun regional. Dengan adanya indeks ini, para pengambil kebijakan dapat lebih mudah menilai efektivitas kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi baru yang lebih tepat sasaran dalam meningkatkan kualitas kebahasaan di Indonesia.

Harapan dalam penyusunan IPBas yaitu keberlanjutan pembangunan kebahasaan dan kesastraan tidak hanya menjadi kebutuhan lokal dan regional, tetapi juga merupakan investasi dalam identitas nasional dan memungkinkan Indonesia untuk berbicara lebih banyak di kancah internasional. Melalui evaluasi yang cermat dan penyusunan indeks yang tepat, Indonesia dapat memastikan bahwa upaya-upaya pembangunan kebahasaan yang telah dilakukan akan memberikan dampak yang signifikan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan secara menyeluruh.

iv. Status Tanah dan Bangunan di Lingkungan Badan Bahasa

Dalam rangka pemenuhan penilaian Reformasi Birokrasi, Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menginisiasi untuk melakukan upaya optimalisasi standar pelayanan publik untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat melalui pemenuhan prasarana satker secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2024. Upaya pemenuhan standar sarana dan prasarana ini tercantum dalam Rencana Strategis Badan Bahasa tahun 2020—2024. Kepemilikan tanah dan gedung terdapat 4 kategori, yaitu.

- memiliki tanah dan bangunan;
- memiliki bangunan yang berdiri di tanah pemerintah provinsi;
- memiliki tanah, tetapi berkantor di UPT Kemendikbudristek; dan
- belum memiliki tanah dan bangunan gedung kantor sendiri.

Berikut progres informasi kepemilikan prasarana di lingkungan Badan Bahasa.

Nama Satuan Kerja	Tanah	Bangunan	Pinjam Pakai/Pengguna Sementara	Menempat Satker	Menempati Gedung Satker BPP Bahasa
BBP Jawa Tengah		V	V		
BBP Jawa Timur		V	V		
KBP Jambi		V	V		
BBP Sumatera Selatan		V	V		
KBP Kalimantan Timur		V	V		
BBP Sulawesi Utara		V	V		
BBP Sulawesi Tengah	V	V			
KBP Maluku	V				V
KBP Nusa Tenggara Barat		V	V		
KBP Bengkulu	V			V	
KBP Maluku Utara	V			V	
KBP Banten	V			V	
KBP Kepulauan Bangka Belitung	V			V	
KBP Gorontalo	V			V	
KBP Kepulauan Riau	V			V	

Nama Satuan Kerja	Tanah	Sertifikat	Pinjam Pakai	Penggunaan Sementara	Menempat Satker
BBP Jawa Tengah	V	V			
BBP Jawa Timur	V	V			
KBP Jambi			V		
BBP Sumatera Selatan	V				
KBP Kalimantan Timur	V				
BBP Sulawesi Utara	V				
BBP Sulawesi Tengah	V				
KBP Maluku	V	V			
KBP Nusa Tenggara Barat	V	V			
KBP Bengkulu	V	V			V
KBP Maluku Utara	V	V			V
KBP Banten	V	V			
KBP Kepulauan Bangka Belitung	V	V			V
KBP Gorontalo	V	V			
KBP Kepulauan Riau	V	V			V

c. Inovasi

Berikut merupakan inovasi-inovasi yang dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Badan Bahasa di tahun 2024 dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan capaian kinerja.

i. Pengembangan Laman GESIT

The screenshot shows the 'Admin Widyabasa' interface. The sidebar menu includes options like 'Beranda', 'Pusat', 'Data Widyabasa', 'Data Jabatan', 'Data Penerimaan', and 'Data Rincian'. The main content area displays a table titled 'Jadwal Widyabasa' with columns for 'No.', 'Tahapan', 'tgl.mulai', 'tgl.selesai', and 'stts'. The table lists three stages: 'PENDAFTARAN', 'SELESAI', and 'PONTORANDO'.

Fitur informasi jadwal pengujian di GESITWidyabasa

Pengembangan Fitur Layanan Informasi terkait Jabatan Fungsional Widyabasa pada laman Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu (GESIT) merupakan inovasi yang digunakan sebagai sistem informasi, manajemen dan pangkalan data Widyabasa untuk mengakses dan mengirimkan data. Laman Aplikasi Widyabasa ini akan dibangun menggunakan platform PHP dan DBMS

(Database Management System) MySQL. Pengembangan laman ini diutamakan pada pengembangan fitur:

- a) Bank Soal Widyabasa
- b) Pengujian Widyabasa

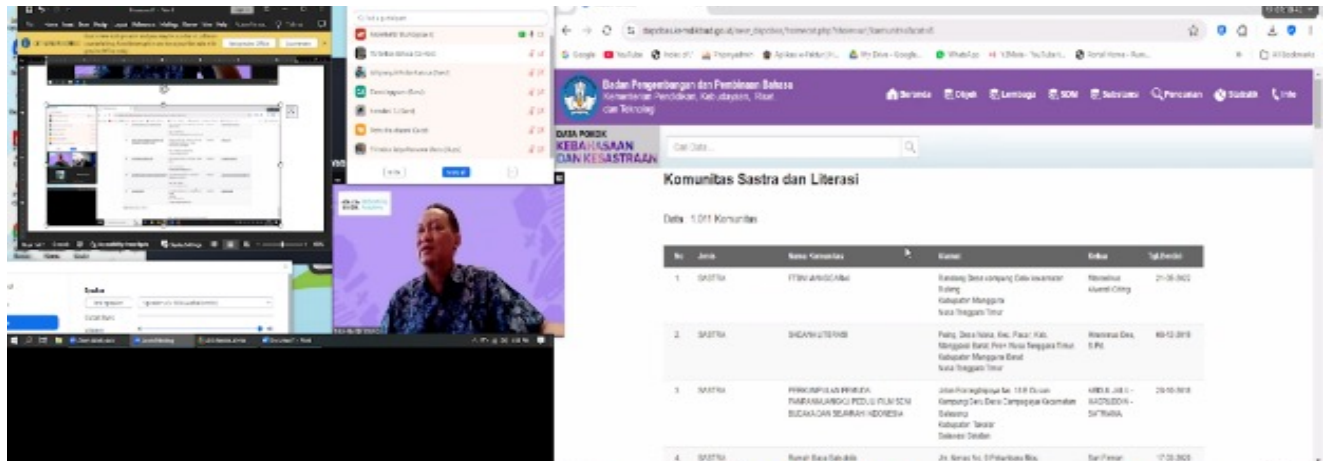


Fitur informasi soal pengujian Widyabasa

Melalui penambahan fitur ini, dapat mengkomodasi kebutuhan informasi terkait proses seleksi dan penetapan pegawai sebagai widyabasa dalam bentuk sarana aplikasi yang mudah diakses dari manapun secara daring. Sehingga melalui fitur yang telah dikembangkan, pengadaan jabatan fungsional tertentu Widyabasa baik untuk internal maupun eksternal Badan Bahasa dapat dilaksanakan lebih efektif dan efisien.

ii. Pengembangan Laman Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan

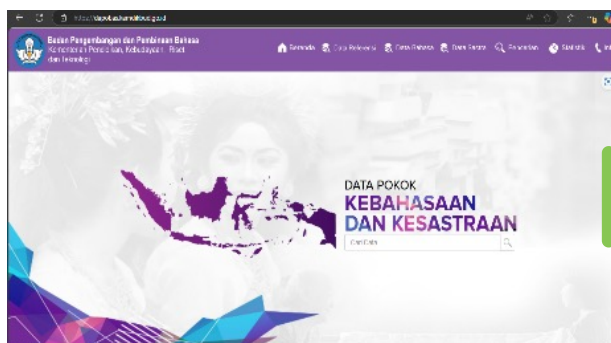
Berdasarkan arahan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Data Kebudayaan, Kebahasaan, dan Kesastraan, maka dilakukan inovasi untuk menyesuaikan dan menata atribut dan struktur data informasi (metadata) yang saat ini ada pada SIDAKS. Seluruh data dan informasi satker di lingkungan Badan Bahasa terpusat melalui aplikasi SIDAKS selanjutnya diintegrasikan ke Laman DAPOBAS.



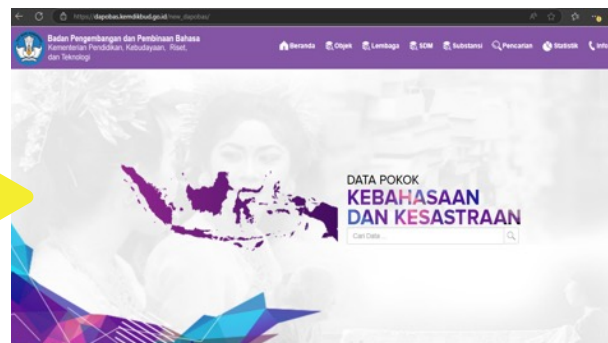
Narasumber dari CISCO Academy Pengembangan laman Dapobas

Pengembangan laman Dapobas yang disesuaikan dengan. Pada laman Dapobas baru, entitas yang dikembangkan antara lain:

- a) Objek Kebahasaan dan Kesastraan
- b) Lembaga Kebahasaan dan Kesastraan
- c) SDM Kebahasaan dan Kesastraan
- d) Substansi Kebahasaan dan Kesastraan



Laman DAPOBAS Semula



Laman DAPOBAS Menjadi

Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat memudahkan pemenuhan kebutuhan terkait data dan informasi pengembangan, perlindungan, dan pembinaan kebahasaan dan kesastraan, baik untuk internal Badan Bahasa maupun eksternal atau masyarakat yang membutuhkan informasi kebahasaan dan kesastraan.

d. Penghargaan

Penghargaan yang diterima oleh Sekretariat Badan Bahasa tahun 2024, yaitu.

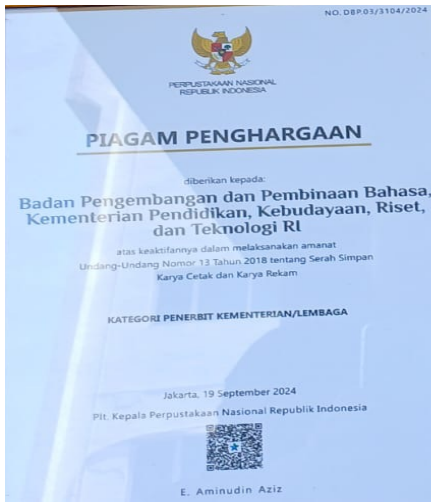
i. Kontributor Aksi Damai Gaza



Kegiatan "Parade Puisi Untuk Gaza"

Sekretariat Badan Bahasa berkolaborasi dengan majalah Sastra Horison dan Himpunan Seni Budaya Islam (HSBI) sebagai bentuk solidaritas sastrawan dan budayawan Indonesia untuk Gaza dengan tajuk **"Parade Puisi Untuk Gaza"** dengan mengangkat tema "Solidaritas Sastrawan dan Budayawan Indonesia untuk Palestina". Kegiatan dihadiri oleh lebih dari 100 orang secara daring di gedung pertemuan di Badan Bahasa dan secara luring melalui kanal youtube Badan Bahasa. Turut hadir dalam kegiatan Parade Baca Puisi untuk Gaza, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair S. M. Alshun, dan beberapa nama besar yang berpartisipasi antara lain nama besar yang berpartisipasi antara lain Taufiq Ismail, Putu Wijaya, Eka Budianta, Aspar Paturusi, Jose Rizal Manua, Ahmadun Yosi Herfanda, Dewi Motik Pramono, Jajang C Noer, Fadli Zon, Ratna Riantiarno, Helvy Tiana Rosa, Fatin Hamama, Linda Djalil, Clara Sinta, Abrori Jabbar, Jamal D Rahman, Sastri Sweeney, Tami, Nissa Rengganis, Riri Fitri Sari, serta sastrawan dan budayawan lainnya. Selain itu, turut hadir membacakan puisi berjudul Tanah Air Gaza, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Suharti. Penghargaan dari Kedutaan Besar Palestina ini diserahkan dan diterima oleh Sekretaris Badan Bahasa pada tanggal 30 Agustus 2024.

ii. Serah Simpan Karya Cetak



Penghargaan Serah Simpan Karya Cetak (KCKR) adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada individu, institusi, atau penerbit yang telah memenuhi kewajibannya menyerahkan karya cetak dan karya rekam kepada perpustakaan nasional atau lembaga yang berwenang. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR) dalam rangka melestarikan warisan intelektual dan budaya bangsa. Penghargaan KCKR kategori Penerbit Kementerian/Lembaga diberikan oleh Perpustakaan Nasional yang diterima oleh perwakilan Sekretariat Badan Bahasa pada tanggal 19 September 2024.

iii. Kolaborasi Parade Puisi untuk Gaza



Piagam penghargaan diberikan oleh majalah Horison sebagai bentuk apresiasi atas hasil kolaborasi yang apik antara HSBI, majalah Horison, dan Sekretariat Badan Bahasa dalam Parade Puisi untuk Gaza dalam rangka menyuarakan solidaritas atas situasi dan kondisi kemanusiaan di Palestina. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah sastrawan, seniman, dan budayawan terkemuka yang turut membacakan puisi bertema Palestina. Dengan tajuk

Solidaritas Sastrawan Indonesia untuk Palestina, penghargaan diberikan oleh ketua Yayasan Yayasan Majalah Horison, Fadli Zon, pada tanggal 26 Juli 2024, tepat sehari sebelum kegiatan dilaksanakan.

iv. Festival Pelajar Unggulan 2



Semangat membangun Generasi Emas Indonesia, mendorong Badan Bahasa untuk menerima kunjungan sejumlah 300 orang peserta pelajar dari Yayasan Duta Inspirasi Indonesia di Kemendikbudristek, Perpustakaan/DPR-RI, dan Kemenpora yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia mengikuti Festival Pelajar Unggulan 2. Pelajar unggulan berprestasi dari 20 provinsi

tersebut melakukan pertukaran ide, pengalaman, semangat juang antarpeserta dan saling bertukar pikiran, berbagi pengalaman, dan mendapatkan motivasi dari para tokoh inspiratif.



Festival Pelajar Unggulan merupakan sebuah program pengembangan kepemudaan berskala nasional yang bertujuan untuk mencetak generasi pelajar unggul demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Festival ini bukan hanya sekadar ajang kompetisi, melainkan juga wadah kolaborasi. Para peserta diberikan kesempatan untuk saling bertukar pikiran dan mempererat persahabatan. Semangat kebersamaan ini perlu terus dijaga agar menjadi

penggerak perubahan positif bagi bangsa. Melalui Festival Pelajar Unggulan, diharapkan para peserta tidak hanya meningkatkan potensi diri, tetapi juga memiliki semangat kolaboratif dan inovatif untuk menghadapi tantangan global pada masa depan.

Salah satu agendanya yaitu mengunjungi kantor Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, pada Senin, 25 November 2024. Sekretariat Badan Bahasa mendapatkan apresiasi sebagai salah satu lembaga pendukung dalam rangka memeriahkan Festival Pelajar Unggulan tahun 2024.

v. Kearsipan



Berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Internal (LAKI) tahun 2023, Badan Bahasa berada pada urutan ketiga pemilik nilai entitas tertinggi. Nilai entitas Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa diperoleh dari hasil rata-rata nilai Unit Pengolah ditambah dengan nilai Unit Kearsipan dibagi dua, sebagai mana tergambar dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 9
Nilai Entitas Badan Bahasa hasil
Pengawasan Kearsipan Internal tahun 2023

No	Unit Pengolah	Nilai Pengawasan Tahun 2023
1	Sekretariat Badan PP Bahasa	98,72
2	Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	95,83
3	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	95,83
4	Pusat Penguatan dan Pemberdayaan Bahasa	95,23
TOTAL		385,61
Rata-rata UP		96,40
Nilai UK		91,79
Nilai Entitas		94,10

Berdasarkan hasil penilaian pengawasan tersebut, Badan Bahasa berhasil memperoleh penghargaan sebagai Unit Pengolah Arsip Terbaik III di lingkungan Unit Kearsipan Unit Utama yang diberikan pada tanggal 22 April 2024.

vi. Pegawai Berprestasi se-Kemendikbudristek di bidang Managerial



Penghargaan Pegawai Berprestasi bidang Manajerial tahun 2024

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Biro Sumber Daya Manusia (Biro SDM), menggelar Penanugerahan Penghargaan Pegawai Berprestasi Kemendikdasmen 2024. Gelaran Penanugerahan Penghargaan Pegawai Berprestasi merupakan kali ketiga sejak adanya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tahun 2018. Penganugerahan tahun 2024 diberikan kepada 51 pegawai yang telah mengikuti ajang pemilihan pegawai berprestasi di lingkungan Kemendikdasmen, salah satunya diterima oleh Sekretaris Badan Bahasa, yaitu Hafidz Muksin dengan kategori Pegawai Berprestasi di bidang Managerial. Seluruh rangkaian seleksi administrasi dan asesmen telah dilakukan dengan melibatkan Sekretariat Militer Presiden. Upaya ini dilaksanakan dalam rangka memberikan makna untuk pembangunan

pendidikan Indonesia dan menginspirasi membangun semangat kerja yang baik kepada sesama pegawai khususnya di lingkungan Kemendikbudristek.

e. Program Crosscutting/Kolaborasi

Sekretariat Badan Bahasa dalam rangka mengoptimalkan capaian kinerja, menjalin kerja sama dan berkolaborasi dengan mitra eksternal Badan Bahasa, baik di dalam maupun di luar lingkungan Kemendikbudristek. Berikut penjelasan singkat hasil kolaborasi selama tahun 2020--2024.

Program Kolaborasi	Pembagian Peran			
	Badan Bahasa		Lembaga/Kementerian Eksternal	
Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan tentang Widyabasa	1	Menyusun substansi, konsep peraturan, dan struktur yang akan disusun	1	Melakukan telaah dan pemenuhan data mulai dari konsep peraturan, substansi, dan struktur peraturan yang akan disusun
	2	Menyusun naskah akademik peraturan perundang-undangan	2	Mengarahkan dan mereviu tugas utama JF Widyabasa, butir kegiatan tiap jenjang, syarat jabatan, hingga angka kredit JF Widyabasa

Program Kolaborasi	Pembagian Peran			
	Badan Bahasa		Lembaga/Kementerian Eksternal	
			3	Mengarahkan proses pengangkatan Widyabasa
			4	Melakukan harmonisasi terkait peraturan yang akan diundangkan
			5	Melakukan reviu terhadap persetujuan Presiden
Buku Statistik Kebahasaan dan Kesastraan Tahun 2023	1	Menyediakan data substansi kebahasaan dan kesastraan	1	Menyusun data statistik kebahasaan dan kesastraan
	2	Melaksanakan penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang bahasa dan sastra Indonesia	2	Melaksanakan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi
			3	Melaksanakan pelayanan data, analisis data, dan statistik Pendidikan dan kebudayaan
			4	Melaksanakan analisis data dan penyusunan statistik pendidikan dan kebudayaan
			5	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi
Program Kolaborasi	Pembagian Peran			
	Badan Bahasa		Lembaga/Kementerian Eksternal	
Rancangan Kepmendikbudristek Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Data Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan	1	Merancang draf dan naskah akademik usulan peraturan perundang-undangan	1	Menyelaraskan dan mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang disusun dan diusulkan oleh Badan Bahasa
Penerbitan Jurnal Rampak Serantau	1	Menyajikan hasil karya tulisan kebahasaan dan kesastraan	1	Menilai dan memperhatikan keterbacaan jurnal kebahasaan dan kesastraan
Penyelenggaraan Malam Sastra	1	memfasilitasi sastrawan untuk menyuguhkan kreasi sastra dan mengenang kembali jasa para sastrawan besar sekaligus untuk apresiasi para pegiat dan karya sastra	1	memberikan suguhan kreasi karya sastra
Penajaman isu kebahasaan dan kesastraan	1	Menyediakan data kebahasaan dan kesastraan sebagai sumber yang perlu disensus oleh BPS	1	Menitipkan pertanyaan perihal kebahasaan yang akan disertakan dalam sensus/survei BPS
	2	Memunculkan substansi di bidang kebahasaan dan kesastraan di narasi RPJMN 2025—2029	2	Memasukkan isu kebahasaan dalam narasi RPJMN 2025—2029
	3	Menyusun analisis kebutuhan substansi bidang kebahasaan dan kesastraan yang akan diatur di dalam naskah akademik peta jalan literasi nasional	3	Menyusun naskah akademik tentang peta jalan literasi nasional
	4	Menyusun usulan masukan terhadap RUU Bahasa Daerah	4	Membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Bahasa Daerah

Program Kolaborasi	Pembagian Peran			
	Badan Bahasa		Lembaga/Kementerian Eksternal	
	5	Menyusun indeks pembangunan kebahasaan (IPBas)	5	Memberikan dukungan tenaga teknis dalam penyusunan indeks pembangunan kebahasaan (IPBas)
Peningkatan Literasi melalui kegiatan "Membaca Raden Saleh"	1	Mempromosikan perpustakaan Badan Bahasa, menjelaskan tentang koleksi perpustakaan, dan fasilitasi peserta	1	Mengatur jalannya memeriahkan acara "Membaca Raden Saleh"
Sosialisasi Program dan Pembinaan Badan Bahasa bersama Komisi X DPR-RI	1	Memfasilitasi kunjungan kerja tim sosialisasi program dan pembinaan bahasa dan sastra	1	Melakukan sosialisasi program Prioritas Badan Bahasa
	2	Menyiapkan buku bacaan pendukung literasi untuk diserahkan saat kunjungan kerja	2	Memberikan secara simbolis buku bacaan pendukung literasi ke wilayah kunjungan kerja
HISKI (Perayaan 100 tahun AA Navis)	1	Memfasilitasi seminar dan rangkaian perayaan 100 tahun AA Navis.	1	Berpartisipasi dalam mengeksplorasi kearifan AA Navis.
	2	Mendokumentasikan visi dan estetika A.A. Navis sebagai salah satu pelopor perubahan dan pengembangan budaya dan estetika lokal dan nasional.	2	Mengembangkan kajian-kajian akademik di bidang bahasa dan sastra untuk kemajuan peradaban bangsa.
Buku Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan	1	Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dan informasi di bidang bahasa dan sastra Indonesia.	1	Melaksanakan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan dan pendayagunaan teknologi informasi.
	2	Melaksanakan penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang bahasa dan sastra Indonesia.	2	Melaksanakan pengembangan indikator dan metode statistik pendidikan dan kebudayaan.
			3	Melaksanakan pelayanan data, analisis data, dan statistik Pendidikan dan kebudayaan Melaksanakan analisis data dan penyusunan statistik pendidikan dan kebudayaan.
	4		4	Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi.
Publikasi Film Animasi	1	Menyediakan konten publikasi untuk Lynkstream	1	Mengunggah sajian hiburan kebahasaan dan kesastraan baik dalam bentuk film animasi maupun buku cerita anak hasil penyusunan oleh tim Badan Bahasa
Indeks Pembangunan Kebahasaan (IPBas)	1	Mengakomodasi dan memfasilitasi diskusi serta penyusun konseptual data bidang kebahasaan dan kesastraan	1	menyusun dimensi, indikator, metadata, dan definisi operasional indeks pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan
			2	Menyusun naskah akademik IPBas
			3	penyiapan, pengolahan, dan analisis hasil data dan informasi indikator indeks pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan

Program Kolaborasi	Pembagian Peran	
	Badan Bahasa	Lembaga/Kementerian Eksternal
		4 Kontributor data indikator publikasi ilmiah dan populer bidang kebahasaan dan kesastraan ber-ISSN
		5 Kontributor data indikator publikasi ilmiah dan populer bidang kebahasaan dan kesastraan ber-ISBN
Metadata Variabel Kebahasaan dan Kesastraan	1 Melaksanakan penyusunan standar data kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan statistik kebahasaan dan kesastraan	1 Memberikan pedoman dan melaksanakan pendampingan dalam penyusunan metadata kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan ketentuan
	2 Melaksanakan penyusunan metadata kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan statistik kebahasaan dan kesastraan	2 Memberikan pedoman dan melaksanakan pendampingan dalam penyusunan metadata kebahasaan dan kesastraan sesuai dengan ketentuan



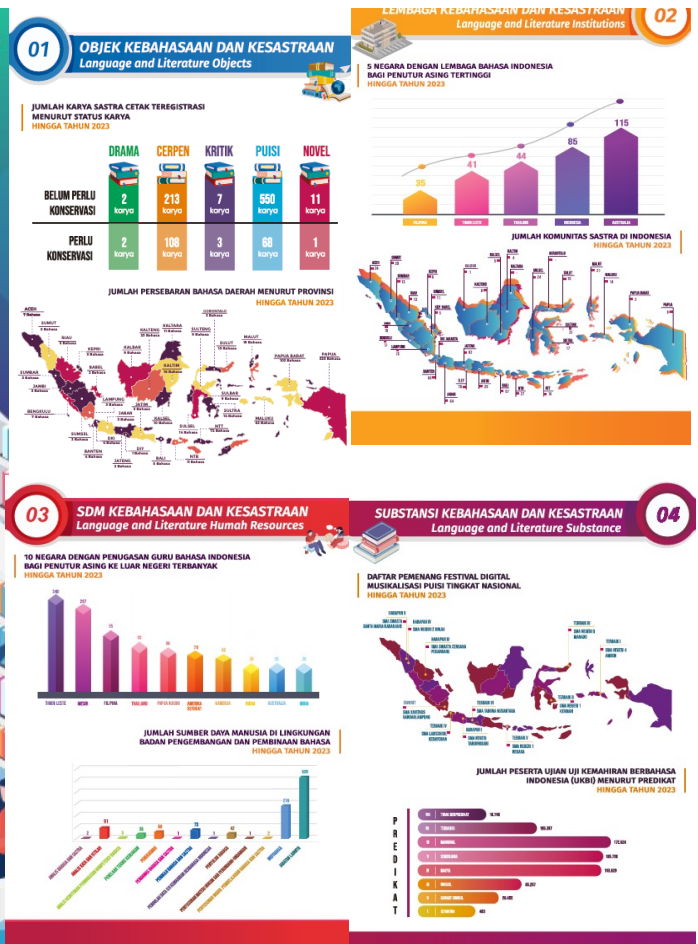
Penyerahan Buku Bacaan Pendukung Literasi ke Walikota Solo



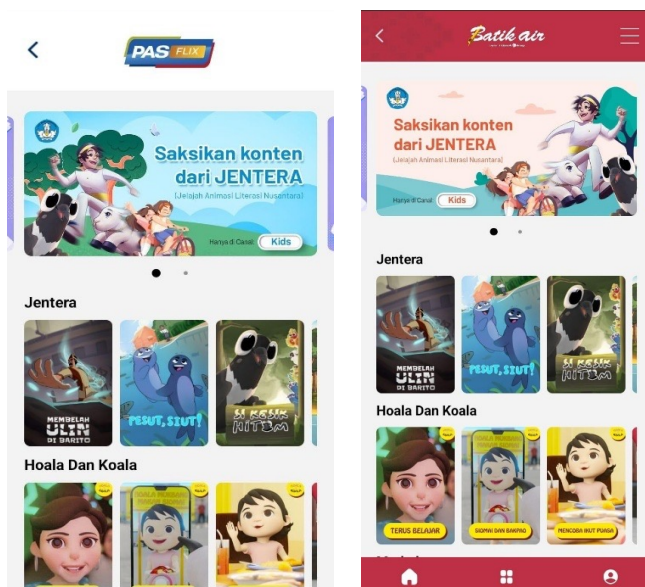
100 Tahun AA Navis: Rayakan Warisan Sastra dan Pemikiran Bangsa, di Perpustakaan Nasional



Pengembangan Data Pokok Kebahasaan dan Kesastraan dengan BPS



Buku Statistik Kebahasaan dan Kesastraan 2024



Konten Jentera di aplikasi Tripper dan Pasflix



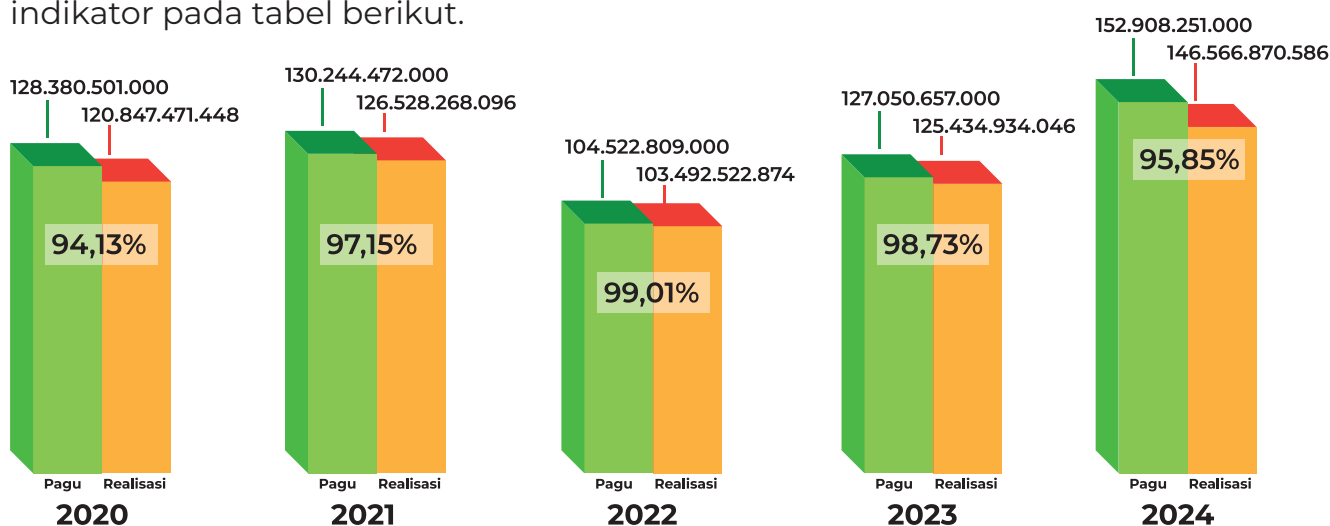
Diskusi IPBas dengan mitra BRIN

BAB IV PENUTUP

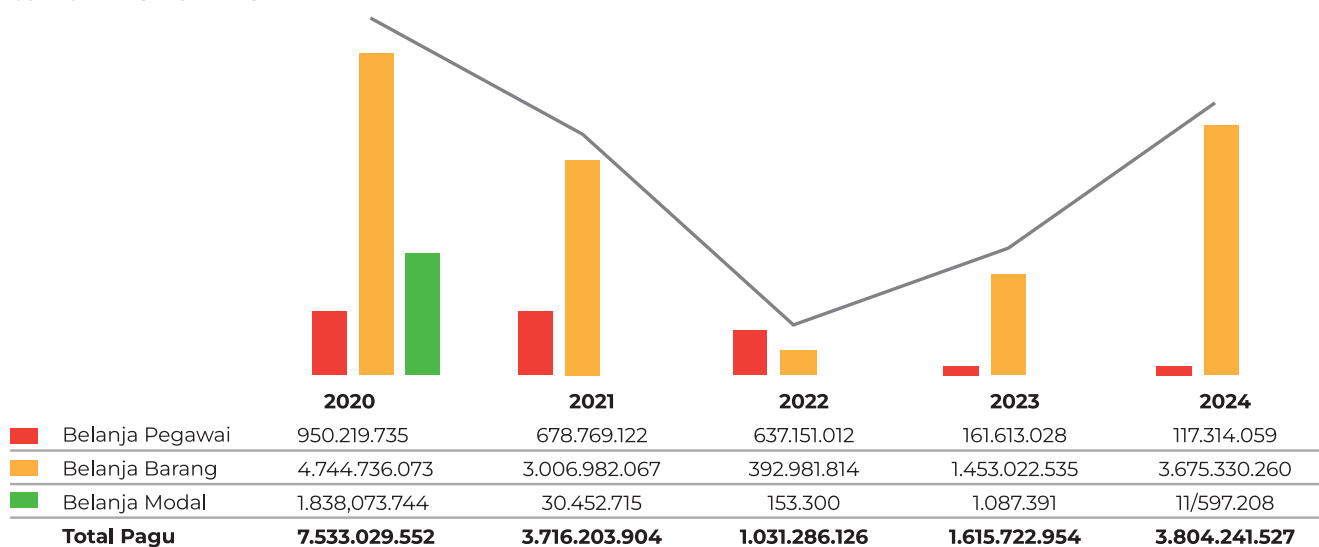
Selama tahun 2020—2024, Sekretariat Badan Bahasa telah berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Berikut adalah tren pagu alokasi dan realisasi per belanja Sekretariat Badan Bahasa tahun 2020—2024.

Kinerja Sekretariat Badan Bahasa tahun 2020—2021 secara keseluruhan dinyatakan berhasil meskipun terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan di tahun 2021 dan ketidaktercapaian target Jumlah Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Namun secara keseluruhan kinerja Sekretariat Badan Bahasa tahun 2020—2021 melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan capaian rata-rata sebesar 130,61%. Hal ini diperkuat melalui realisasi anggaran per indikator pada tabel berikut.



Berikut adalah tren pagu alokasi dan realisasi per belanja Sekretariat Badan Bahasa tahun 2020—2024



Kinerja Sekretariat Badan Bahasa tahun 2020—2021 secara keseluruhan dinyatakan berhasil meskipun terdapat perubahan indikator kinerja kegiatan di tahun 2021 dan ketidaktercapaian target Jumlah Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM. Namun secara keseluruhan kinerja Sekretariat Badan Bahasa tahun 2020—2021 melebihi dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan capaian rata-rata sebesar 130,61%. Hal ini diperkuat melalui realisasi anggaran per indikator pada tabel berikut.

IKK	Pagu 2020	Realisasi	%	Pagu 2021	Realisasi	%
Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB	8.236.880.000	7.453.058.103	90,48	5.106.528.000	4.944.341.542	96,82
Rata-Rata Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 91	96.189.131.000	93.000.023.673	96,68	82.866.389.000	82.160.380.393	99,15
Jumlah Satker yang Dibina Menuju WBK	23.954.490.000	20.714.127.066	86,47	-	-	0,00
Jumlah Satker yang mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	-	-	-	42.271.555.000	39.423.546.161	93,26

Kinerja Sekretariat Badan Bahasa sejak tahun 2022—2023 dinyatakan berhasil yang ditunjukkan melalui peningkatan capaian kinerja dengan rata-rata kinerja sebesar 154,73% dari 2 indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022 dan 2023. Capaian kinerja ini didukung oleh realisasi anggaran tahun 2022—2023 per indikator berikut ini.

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	23.483.758.000	23.213.435.646	98,85	24.109.853.000	23.663.307.369	98,15
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	81.039.051.000	80.279.087.228	99,06	102.940.804.000	101.771.626.677	98,86
TOTAL	104.522.809.000	103.492.522.874	99,01	127.050.657.000	125.434.934.046	98,73

Keberhasilan kinerja tahun 2022—2023 diikuti kinerja di tahun 2024. Secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena mengalami peningkatan capaian kinerja dengan rata-rata sebesar 111,55% dari dua indikator kinerja kegiatan yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024. Jika diakumulasikan peningkatan kinerja tahun 2022—2024 dengan rata-rata nilai sebesar 140,33%.

Capaian kinerja tahun 2024 didukung oleh realisasi anggaran tanpa blokir anggaran sebesar Rp149.104.009.493,00 (99,36%), dari total pagu Rp152.908.251.000,00.

Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran		Pagu Aktif	Realisasi	
	Pagu	Blokir		Anggaran	%
Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	35.694.479.000	2.688.652.000	32.848.947.000	32.672.696.352	99,46
Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	117.213.772.000	0	117.213.772.000	116.431.313.121	99,33
TOTAL	152.908.251.000	152.908.251.000	150.062.719.000	149.104.009.473	99,36

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari hasil evaluasi kinerja,

1

Dinamika formulasi penilaian nilai kinerja anggaran di kementerian/lembaga sebagai dampak dari arahan peraturan perundang-undangan.

2

Perlu menyusun pedoman standar sarana dan prasarana satker dalam rangka meningkatkan upaya pelayanan publik kepada masyarakat.

3

Penyamaan persepsi terkait sistematika dan hasil penilaian evaluasi AKIP.

4

Kesiapan satker di lingkungan Badan Bahasa untuk diusulkan menjadi satker berpredikat ZI-WBK/WBBM.

Berikut tindak lanjut dan hasil tindak lanjut dari langkah perbaikan di tahun 2024 berdasarkan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

Langkah Perbaikan TA 2024		Tindak Lanjut Langkah Perbaikan TA 2024		Hasil Tindak Lanjut TA 2024	
1	Penandatanganan komitmen untuk mengimplementasikan ZI-WBK/WBBM dan SAKIP di seluruh satuan kerja.	1	Seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa telah menandatangani komitmen implementasi ZI-WBK/WBBM	1	Meningkatnya jumlah satker yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM semula 9 menjadi 12 satker
2	Melakukan sosialisasi dan pendampingan terkait ZI-WBK/WBBM dan SAKIP.	2	Sosialisasi dan pendampingan telah dilakukan ke seluruh satker di lingkungan Badan Bahasa baik secara bersemuka maupun daring	2	Meningkatnya jumlah satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal BB semula 33 menjadi 34 satker mendapatkan predikat AA dan A
3	Mempersiapkan sistem, petunjuk teknis, dan anutan (role model) sebagai panduan satker dalam melaksanakan pembangunan ZI-WBK/WBBM.	3	Telah disusun pedoman penilaian pembangunan ZI-WBK/WBBM yang menjadi acuan seluruh satker	3	Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menjadi anutan (role model) pelaksana pembangunan ZI-WBK/WBBM
4	Menyelaraskan pemahaman antara penilai, pendamping, dan satuan kerja yang dinilai perihal substansi penilaian SAKIP.	4	Konsinyasi dan koordinasi antara tim evaluator dan satker perihal substansi, pedoman evaluasi AKIP, dan pendampingan satker yang dilakukan secara berkala	4	Meningkatnya jumlah satker yang mendapatkan predikat SAKIP minimal BB semula 33 menjadi 34 satker mendapatkan predikat AA dan A

Berikut gambaran arah dan kebijakan di Sekretariat Badan Bahasa untuk mendukung ketercapaian program di Badan Bahasa di periode berikutnya.

Arah dan kebijakan di Sekretariat Badan Bahasa

untuk mendukung ketercapaian program
di Badan Bahasa periode berikutnya

1. Komitmen pimpinan dan pegawai satuan kerja untuk melakukan perubahan budaya kerja dan inovasi untuk meningkatkan kepuasan pelanggan (Masyarakat).
2. Mempertahankan nilai SAKIP pada predikat minimal A
3. Evaluasi pelaksanaan program dan anggaran substansi teknis kebahasaan dan kesastraan di lingkungan Badan Bahasa
4. Mereformulasikan metode dan pedoman reward dan punishment berbasis kinerja
5. Menindaklanjuti kolaborasi mitra eksternal Badan Bahasa yang potensial dan mengoptimalkan kolaborasi antar satker di lingkungan BPP Bahasa
6. Memberikan penghargaan bagi satker yang sudah mendapatkan predikat ZI- WBK/WBBM

LAMPIRAN



Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Hafidz Muksin

Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : E. Aminudin Aziz

Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 15 Februari 2024

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,

Sekretaris Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
E. Aminudin Aziz
NIP 196711161992031001



Ditandatangani secara elektronik
oleh :
Hafidz Muksin
NIP 197001221990011001



Catatan :

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



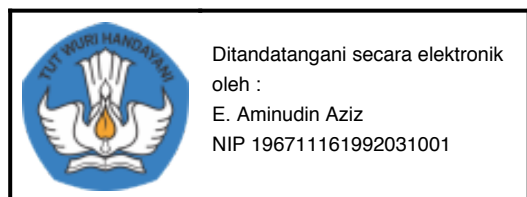
Sasaran (S/SK)	Indikator (IKU/IKK)	Target Perjanjian Kinerja 2024
[1.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[1.1] Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	97
[1.0] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[1.2] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	10

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1.	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp. 158.510.066.000,-
Total Anggaran			Rp. 158.510.066.000,-

Jakarta, 15 Februari 2024

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,

Sekretaris Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé





Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Sekretaris Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : Hafidz Muksin
Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**


Nama : E. Aminudin Aziz
Jabatan : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran Perjanjian Kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari Perjanjian Kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 12 Desember 2024

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa
E. Aminudin Aziz

 Ditandatangani secara elektronik oleh
Sekretaris Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa
Hafidz Muksin




Catatan :
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR




Balai
Sertifikasi
Elektronik

Sasaran	Indikator	Satuan	Target
[SK 1] Meningkatnya tata kelola Satuan Kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	[IKK 1.1] Persentase satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memiliki predikat SAKIP minimal BB	%	97
	[IKK 1.2] Jumlah Satker di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diusulkan mendapatkan predikat ZI-WBK/WBBM	Satker	10

No	Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1	2020	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Rp 152.908.251.000
Total Anggaran			Rp 152.908.251.000


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Kepala Badan Pengembangan dan
 Pembinaan Bahasa
 E. Aminudin Aziz

Jakarta, 12 Desember 2024


 Ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Badan Pengembangan
 dan Pembinaan Bahasa
 Hafidz Muksin



Catatan :
 • UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 • Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E



**Balai
 Sertifikasi
 Elektronik**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur 12330
Telepon: (021) 4706287; Laman badanbahasa.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3118 /T1/PR.01.03/2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2024

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik;
- b. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik, perlu membentuk tim penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun LAKIP Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Badan ini.

KEDUA : Tim Penyusun LAKIP Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024;
- b. menyusun capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024;
- c. menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024;
- d. merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun

2024 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;

- e. menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa;
- f. menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; dan
- g. memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Badan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS BADAN,



HAFIDZ MUKSIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3118 /T1/PR.04.03 /2024
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2024

TIM PENYUSUN LAKIP
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Hafidz Muksin	Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Pengarah	<ul style="list-style-type: none">• Mengawasi capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.• Mengawasi capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.• Mengarahkan penyusunan draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.• Mengarahkan revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.• Mengawal hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Mengawal penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Mengawal publikasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
2.	Tri Indira Satya P.	Pranata Komputer Ahli Muda	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasi capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Mengkoordinasi penyusunan capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Mengkoordinasi penyusunan draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Mengkoordinasi revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Mengkoordinasi hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Mengkoordinasi penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Mengkoordinasi dalam publikasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
3.	Sunardi	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
4.	Ratna Perwitosari	Perencana Ahli Muda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
5.	Sun'an Yohantho	Perencana Ahli Muda	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
6.	Dede Saputra	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
7.	Dinar Kartika Apriliani Wijayanti	Perencana Ahli Pertama	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
8.	Akhmad Susanto	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
9.	Nurjaman	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
10.	Uud Suyuhudin	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
11.	Ika Maryana	Pengolah Data dan Informasi	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>Bahasa Tahun 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
12.	Dimas Satria Putra	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun capaian Indikator Kinerja Program sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun capaian Indikator Kinerja Kegiatan sebagai bahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Menyusun draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024. • Merevisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				<p>Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 atas arahan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan hasil revisi draf Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 untuk ditandatangani oleh Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. • Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. • Memublikasikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.



SEKRETARIS BADAN,


 HAFIDZ MUKSIN



KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3117/11/PR.04.03/2024
TENTANG
TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2024

SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun secara periodik;
- b. bahwa untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik, perlu membentuk tim reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005—2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 319);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 198);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 717);
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA, KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Reviu LAKIP Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Badan ini.

KEDUA : Tim Reviu LAKIP Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. memastikan akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas; dan
- b. menyusun rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan Sekretaris Badan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS BADAN,



HAFIDZ MUKSIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3117 /11 / PR.04.03 /2024
TENTANG
TIM REVIU LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
TAHUN 2024

TIM REVIU LAKIP
SEKRETARIAT BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1.	Margiyati	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Ketua Tim	<ul style="list-style-type: none">• Mengkoordinasi dan memastikan akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas.• Mengkoordinasi penyusunan rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
2.	Sartono	Kepala Subbagian Tata Usaha, Sekretariat Badan	Anggota	<ul style="list-style-type: none">• Menganalisa akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas.• Melakukan penyusunan rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
3.	Yiying Yuningsih	Perencana Ahli Madya	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisa akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas. • Melakukan penyusunan rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
4.	Oka Wahyu Setiya Adi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisa akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas. • Melakukan penyusunan rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
5.	Danang Harry Wibowo	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisa akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas. • Melakukan penyusunan rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja

NO.	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
				Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.
6.	Dewi Yunita Wulandari	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisa akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja pada laporan kinerja yang disusun akuntabel sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024 berkualitas. • Melakukan penyusunan rekomendasi hasil reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2024.



SEKRETARIS BADAN,

HAFIDZ MUKSIN



Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun,
Jakarta Timur 13220

Telepon (021) 4706287, 4706288, 4896558, 4894564

Faksimile (021) 4750407

Pos-el badan.bahasa@kemdikbud.go.id